



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOTA BALIKPAPAN

BALIKPAPAN KUBANGUN, KUJAGA DAN KUBELA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Persiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refosmasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. Proses Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah menjalankan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Lakip juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip "Good Governmance ", yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Balikpapan, Februari 2014

Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Balikpapan



Dra. Doortje Marpaung, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19630108 198910 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Teknis Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas Perubahan Lingkungan Strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan Keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke Masa Depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah Pengetahuan / masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

3. Menentukan Rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran. Dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

Landasan Hukum Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan sebagai berikut :

a. Landasan Struktural

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

3. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Mengkoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD;
- c. Meneliti kelengkapan dan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
- e. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Melaksanakan verifikasi harian atas permintaan;
- g. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h. Menyusun Neraca SKPD;
- i. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas;
- j. Menyusun laporan keuangan SKPD;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian;
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- (3) Bidang Perindustrian membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- b. Penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang kegiatan dibidang industri;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerbitan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan proses industri untuk pencegahan pencemaran lingkungan;
- e. Pelaksanaan pembinaan sarana, usaha, produksi dan pengendalian mutu;
- f. Penyusunan tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri yang terintegrasi;
- h. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan promosi hasil produksi bidang industri;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha industri kecil menengah dengan dunia usaha;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Seksi Bina Usaha

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Bina Usaha;
- b) Melaksanakan Pembinaan ketrampilan dan kemampuan usaga industri kecil menengah;
- c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerbitan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri;

- d) Melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sector untuk pengembangan usaha industri kecil menengah;
- e) Melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri;
- f) Melaksanakan penyusunan penataan industri untuk pengembangan pusat-pusat industri dan penyediaan sarana dan prasarana untuk industri;
- g) Menyusun dan menyajikan data dan informasi usaha industri;
- h) Melaksanakan fasilitasi pemberian perlindungan dan kepastian berusaha terhadap industri kecil menengah;
- i) Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi bina usaha;
- j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Seksi Bina Produksi

Seksi Bina Produksi mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina produksi ;
- b) Menyusun bahan pembinaan teknis peningkatan produksi, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- c) Memfasilitasi kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan penolong;
- d) Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
- e) Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang industri;
- f) Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dibidang industri;
- g) Melaksanakan pembinaan proses industri untuk pencegahan pencemaran lingkungan;
- h) Melaksanakan Monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Seksi Pengendalian Mutu

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengendalian mutu;
- b) Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengendalian mutu hasil produksi;
- c) Melaksanakan penyusunan dan pembinaan produk unggulan dan produk andalan potensial;
- d) Melaksanakan fasilitasi pengusulan pengujian estandar mutu dan estandar produk barang dan jasa;
- e) Melaksanakan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) produk industri;
- f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan estandar mutu produk di bidang industri;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan;
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang Perdagangan membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang perdagangan ;
- b. Penyusunan petunjuk pelaksanaan perizinan di bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, kegiatan promosi dan kemitraan usaha;
- e. Pengawasan dan pengendalian pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan barang penting;
- f. Pengawasan, pengendalian dan monitoring informasi pasar dan stabilisasi harga;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perdagangan barang kategori dalam pengawasan;
- h. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan;
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perdagangan dalam dan luar negeri;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kemetrolagian;
- k. Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
- l. Pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Wajib Daftar Perusahaan;
- n. Penyelenggaraan dan penyediaan buku informasi daftar perusahaan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan ;
- p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a) Menyusun program dan kegiatan seksi Perdagangan Dalam Negeri;



- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Kota Balikpapan;
 15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.
 16. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan;

b. Landasan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional Indonesia;
3. SK. Kepala BSN Nomor.30/Kep/BSN/03/2005 Tentang Pedoman Standarisasi Nasional;
4. PSN Nomor 01-2007 Pengembangan Standar Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;



6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 Tentang Usaha Kecil;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
11. Kepmen 104-1/2002 yang telah diubah dengan Kepmen Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 Tentang Cara Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/IJKS);

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perkoperasian, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- d. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi melalui perubahan Anggaran Dasar yang

menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi.

- e. Pengoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan melalui pengembangan sistem informasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
- i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (3) Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan Renstra, rencana program dan kegiatan dinas ;

- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan. Kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas;
- c. Pengekoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor
- e. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. Pengekoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;
- g. Pengekoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Sub Bagian Perencanaan Program

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan penyusunan informasi serta evaluasi.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis dinas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- d. Melaksanakan supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- e. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang-bidang lingkup dinas;
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

- h. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dinas;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan /pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perpustakaan, kehumasan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan, alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Menyenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- k. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin/pendaftaran jasa distribusi;
- c) Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan;
- d) Menyusun dan menyajikan data informasi wajib daftar perusahaan;
- e) Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan;
- f) Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi perdagangan barang kategori dalam pengawasan;
- g) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
- h) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
- i) Melaksanakan fasilitasi kegiatan kemetrologian;
- j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasa/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a) Menyusun program dan kegiatan seksi Perdagangan Luar Negeri;
- b) Melaksanakan koordinasi dan mensosialisasikan kebijakan bidang ekspor/impor;
- c) Melaksanakan proses administrasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- d) Melakukan sosialisasi penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang;
- e) Menyiapkan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
- f) Melaksanakan sosialisasi kebijakan penerbitan SKA dan API;

- g) Memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perdagangan luar negeri;
- h) Menyusun dan menyajikan data informasi di bidang perdagangan luar negeri;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri;
- j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

- a) Menyusun program dan kegiatan seksi Perlindungan Konsumen;
- b) Melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- c) Melaksanakan sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- d) Memfasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
- e) Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swasdaya Masyarakat;
- f) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- g) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang beredar dan jasa;
- h) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas barang beredar dan jasa;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Perlindungan Konsumen;
- j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Bidang Koperasi

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Koperasi;
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- (3) Bidang Koperasi membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Bidang koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- b. Pelaksanaan proses pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubabaran koperasi malalui perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian KSP/USP;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pembiyaan bagi koperasi dan UMKM;
- e. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- f. Pemberian layanan penerbitan rekomendasi dan sertifikasi koperasi;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi

Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :

- a) Menyusun program dan kegiatan seksi bina kelembagaan koperasi;
- b) Melaksanakan proses administrasi pengesahan pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

- d) Menyusun, menyajikan data dan informasi koperasi;
- e) Melaksanakan proses administratif penerbitan rekomendasi dan sertifikasi koperasi;
- f) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tata cara pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan kelembagaan koperasi;
- h) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Koperasi

Seksi Pengembangan dan Pemasaran Koperasi mempunyai tugas :

- a) Menyusun program dan kegiatan seksi Pengembangan dan Pemasaran Koperasi;
- b) Melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha;
- c) Melaksanakan pembinaan teknis perkoperasian ;
- d) Melaksanakan fasilitasi pemasaran dan promosi hasil usaha koperasi;
- e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan koperasi;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan dan pemasaran koperasi;
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasa/pimpinan sesuai pertauran yang berlaku.

3. Seksi Pembinaan Usaha

Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas :

- a) Menyusun program dan kegiatan seksi pembinaan usaha;
- b) Melaksanakan fasilitas permodalan koperasi dan usaha kecil menengah;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan penggunaan permodalan koperasi dan usaha kecil menengah;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran dan penggunaan bantuan modal bagi koperasi dan usaha kecil menengah;
- e) Mengoordinasikan uji kelayakan usaha yang akan mendapat bantuan permodalan bagi koperasi dan usaha kecil menengah;
- f) Memberikan bimbingan dan fasilitasi kemitraan antara koperasi dan usaha kecil menengah dengan BUMN dan BUMS;
- g) Menyusun dan menyajikan data dan informasi koperasi dan usaha kecil menengah penerima bantuan permodalan;
- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pembinaan usaha;
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasdi sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam bnerbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2). Setiap Kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;



- (3). Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4). Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

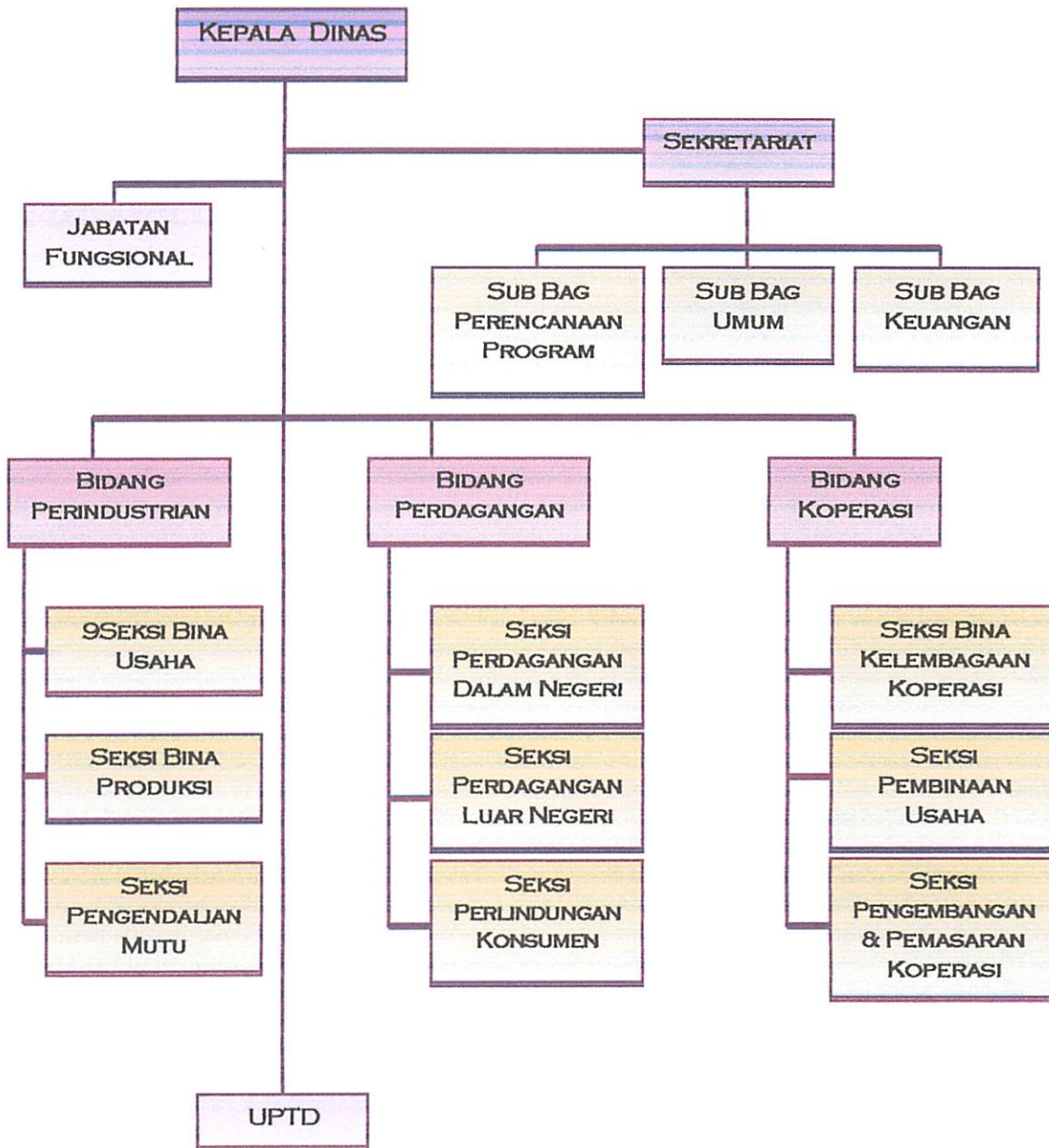
G. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsure pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008, Struktur Organisasi Disperindagkop Kota Balikpapan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian, Bidang Perindustrian dengan 3 (tiga) Seksi, Bidang Perdagangan dengan 3 (tiga) Seksi, Bidang Koperasi dengan 3 (tiga) Seksi, Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :

Struktur Organisasi Dinas



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang ada di Kota Balikpapan akhir Desember tahun 2013 memiliki jumlah pegawai sebanyak 59 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

Tabel 1.
Keadaan Pegawai per Desember 2013

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
5	24	9	1	22	15	3	19	8	4	1	2	37

Sumber data: Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim

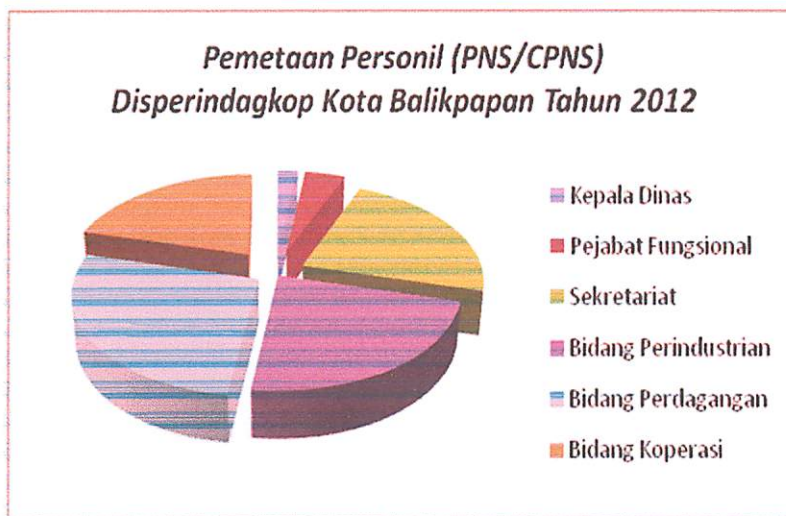
Tabel 2.
Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop Kota Balikpapan Per Desember 2013

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH			
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		L	P		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1.	Sekretariat												3	1	1	1	4
2.	Bidang Industri							1		1				1		3	
3.	Bidang Perdagangan									3						3	
4.	Bidang Koperasi						1			2						2	1
5.	Jafung					1		1								2	
6.	Staf Pelaksana	2		1		1	1	3	3	4	6					11	10
7.	THL/Naban	1	1	1		6	1		1	2	4					10	7
J U M L A H																32	22

Sumber data: Disperindagkop Kota Balikpapan

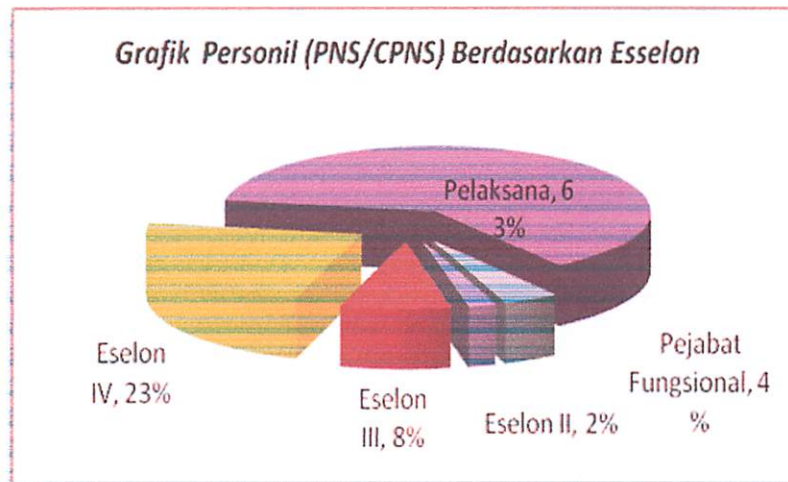
Tabel 2a.
Pemetaan Personil (PNS/CPNS) Disperindagkop Kota Balikpapan Tahun 2013

Bidang Pekerjaan	Jumlah (orang)	%
Kepala Dinas	1	2.08
Pejabat Fungsional	2	4.17
Sekretariat	11	22.92
Bidang Perindustrian	11	22.92
Bidang Perdagangan	13	27.08
Bidang Koperasi	10	20.83
Jumlah	48	100



Tabel 2b.
Persentase Personil (PNS/CPNS) Berdasarkan Esselon
Disperindagkop Kota Balikpapan Tahun 2013

Esselon	Jumlah (orang)	%
Esselon II	1	2.08
Esselon III	4	8.33
Esselon IV	11	22.92
Pejabat Fungsional	2	4.17
Pelaksana	30	62.50
Jumlah	48	100



F. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.
Sarana Kerja Dinas Perindagkop Kota Balikpapan Tahun 2013

NO	SARANA / PRASARANA YANG TERSEDIA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tanah kering	340 m2	Jl.Pramuka/KP.Damai
2.	Tanah Bangunan	255 m2	Jl.Inpres I Rapak
3.	Tanah Bangunan	24.989 m2	Teriitp
4.	Tanah Bangunan	1.778 m2	Klandasan dan Ruhui Rahayu
5.	Gedung Kantor Perindagkop	1 unit	Ruhui Rahayu
6.	Gedung Kantor Permanen KIKS	1 unit	KIK Sumber
7.	Gudang tertutup	1 unit	KIK Sumber
8.	Gedung Instalasi	1 unit	KIK Sumber
9.	Rumah Dinas	2 unit	Baik
10.	Kendaraan Roda Empat	7 unit	Baik
11.	Kendaraan Roda Dua	17 unit	Baik
12.	Bejana Ukur	3 buah	Baik
13.	Timbangan Electronik Cap.30 kg	2 buah	Baik
14.	Timbangan Pos Ukur Ulang	1 buah	Baik
15.	Timbangan Pegas Cap .0 kg	15 buah	Baik
16.	Mesin Pengolah Asap Cair	1 unit	Baik
17.	Air Conditionir (AC)	15 unit	Baik
18.	Printer	25 buah	Baik
19.	Komputer Server	2 unit	Baik
20.	Laptop	15 buah	Baik
21.	Telepon	8 buah	Baik
22.	Furniture kantor	1 set	Baik
23.	Kamera	1 buah	Baik
24.	Mesin Tik Manual	2 buah	Baik
25.	Handycam	1 buah	Baik
26.	Mesin Fotocopy	1 buah	Rusak, Dalam Perbaikan
27.	Infocus	1 buah	Baik
28.	Personal Komputer	38 unit	Baik
29.	Meja Kerja	16 buah	Baik
30.	Kursi Kerja	12 buah	Baik
31.	Lemari File	6 buah	Baik
32.	Filling Besi	4 buah	Baik
33.	Lemari Kayu (Lemari Gantung)	3 buah	Baik
34.	Papan Visual	1 buah	Baik
35.	Elektrik Whiteboard	1 unit	Baik
36.	Tangga Alumunium	1 buah	Baik



37	Dispenser	4 buah	Baik
38	Monitor	38 buah	Baik
39	Tripod Kamera	1 buah	Baik
40	Layar	1 buah	Baik
41	Genset	1 unit	Baik
42	UPS	13 buah	Baik
43	Microphone Table Stand	9 buah	Baik
44	Kursi Tunggu	4 buah	Baik
45	Meja Podium	1 buah	Baik
46	Kursi Rapat	40 buah	Baik
47	Mesin Absen	1 buah	Baik
48	Mesin Pemotong Kertas	1 buah	Rusak
49	Papan Pengumuman	2 buah	Baik
50	Microphone Wireless Mic	2 set	1 Rusak

Tabel 4.
**Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Perindagkop
Kota Balikpapan Tahun 2013**

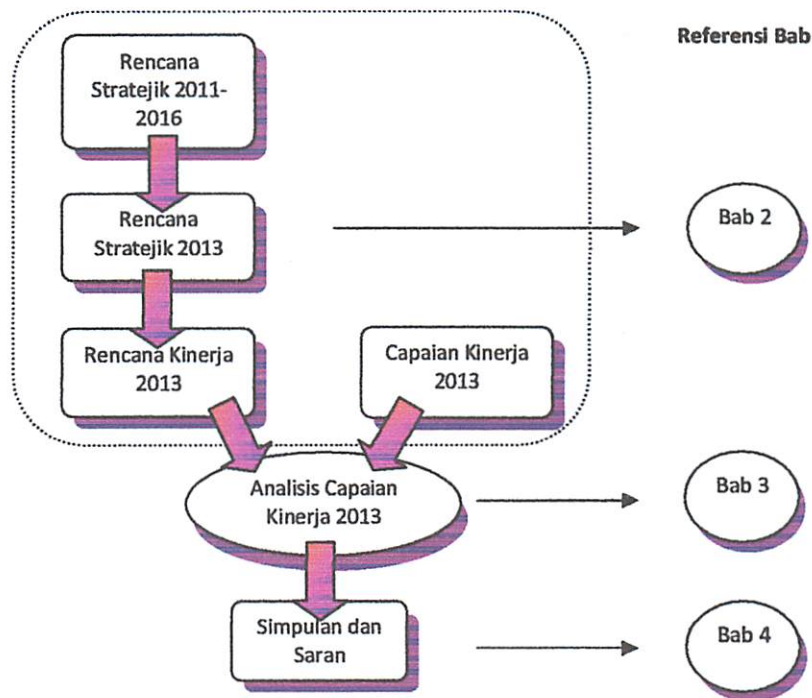
NO	URAIAN	KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan	1 paket	APBD
2.	Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan	1 paket	APBD
3.	Peralatan Kantor	Pemeliharaan	1 paket	APBD
4.	Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan	8 unit roda 4 10 unit roda 2	APBD
TOTAL				

Sumber data : Disperindagkop Kota Balikpapan

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Disperindagkop Kota Balikpapan selama tahun 2013. Capaian kinerja (performance result) 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop Kota Balikpapan dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Rencana Strategik merupakan suatu gambaran singkat yang berorientasi pada sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, hasil, manfaat dan dampak maupun kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik berdasarkan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan program instansi dalam mencapai tujuan maupun sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategik dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang pada dasarnya tidak terlepas dengan Tugas Pokok dan Fungsi Disperindagkop Kota Balikpapan serta Peraturan dan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah.

Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tersebut menjadi bagian integral dari kerangka pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 yang diarahkan pada peningkatan daya saing, mendorong struktur industri yang sehat, berkeadilan dan berkelanjutan serta memperkuat ketahanan ekonomi guna mendorong kemandirian dan keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global. Hal ini dupayakan melalui Peningkatan Kualitas potensi ekonomi dalam arti luas dan pengembangan UMKM/IKM berbasis ekonomi kerakyatan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.



Sehubungan dengan itu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan kemana Disperindagkop akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan mendukung Visi Pemerintah Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut :

VISI :

**TERWUJUDNYA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
YANG TANGGUH**

Untuk mewujudkan Visi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

MISI :

- 1. Mengembangkan UMKM/IKM berbasis ekonomi kerakyatan**
- 2. Meningkatkan sistem perdagangan yang efisien, kompetitif dan pro kompetitif**
- 3. Mengembangkan peran Koperasi dalam perekonomian Kota Balikpapan**
- 4. Meningkatkan tertib administrasi keuangan, SDM dan perkantoran**

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Adapun tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kewirausahaan Baru dibidang Industri;
2. Meningkatkan dan mengembangkan UMKM/IKM berbasis ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan investasi;
4. Meningkatkan sistem perdagangan yang efisien, kompetitif dan pro Kompetitif;
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi kebijakan indagkop;
6. Menciptakan Koperasi berkualitas,mandiri dan profesional;
7. Meningkatkan jaringan usaha yang berkualitas;
8. Tertib administrasi keuangan, SDM dan Perkantoran.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan penjabarannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.

No	Misi	Tujuan Strategik
1	Mengembangkan UMKM/IKM berbasis ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Kewirausahaan Baru di bidang Industri- Meningkatkan dan mengembangkan UMKM/IKM berbasis ekonomi kerakyatan- Meningkatkan Pertumbuhan Investasi
2	Meningkatkan sistem perdagangan yang efisien, kompetitif dan pro kompetitif	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan sistem perdagangan yang efisien, kompetitif dan pro kompetitif- Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Indagkop

3	Mengembangkan peran Koperasi dalam perekonomian Kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none">- Menciptakan Koperasi berkualitas, mandiri dan profesional- Meningkatkan Jaringan Usaha yang berkualitas
4	Meningkatkan tertib administrasi keuangan, SDM dan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">- Tertib administrasi keuangan, SDM dan Perkantoran

3. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran lembaga keuangan dan kemitraan dalam pengembangan UMKM dan Koperasi
2. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatnya Investasi dan produk sektor unggulan daerah
4. Tersedianya bantuan fasilitas sarana dan prasarana kemetrolgian
5. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan investasi
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi
7. Meningkatkan Kualitas Produk UMKM dan Koperasi
8. Meningkatnya kualitas pelayanan dan SDM Disperindagkop Kota Balikpapan (Pelayanan Prima)

Dan sasaran yang ditetapkan dan disusun dalam Rencana Strategik sebagaimana tersebut diatas merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan ini sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian diharapkan apabila sasaran telah tercapai bahwa tujuan strategik juga dapat dicapai.

Sasaran Strategik dapat pula dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 6.

No	Tujuan Strategik	Sasaran Strategik
1	Meningkatkan Kewirausahaan Baru di bidang Industri	- Meningkatnya peran lembaga keuangan dan kemitraan dalam pengembangan UMKM dan Koperasi
2	Meningkatkan dan mengembangkan UMKM/IKM berbasis ekonomi kerakyatan	- Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan
3	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	- Meningkatnya Investasi dan Produk Sektor Unggulan Daerah
4	Meningkatkan sistem perdagangan yang efisien, kompetitif dan pro kompetitif	- Tersedianya sarana dan prasarana Kemetrolgian
5	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Indagkop	- Meningkatnya Efektifitas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan investasi
6	Menciptakan Koperasi berkualitas, mandiri dan profesional	- Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM/IKM dan Koperasi
7	Meningkatkan Jaringan Usaha yang berkualitas	- Meningkatnya kualitas produk UMKM/IKM dan Koperasi
8	Tertib administrasi keuangan, SDM dan Perkantoran.	- Meningkatnya kualitas pelayanan, dan SDM Dipserindagkop Kota Balikpapan (Pelayanan Prima).

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kota Balikpapan menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan disesuaikan dengan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan sebagai berikut:

4. Kebijakan

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan melaksanakan 16 (enam belas) strategi beserta arah kebijakannya, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur serta Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur;
3. Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan dengan didukung sarana dan prasarana sebagai sumber informasi dan peningkatan pelayanan dibidang Indagkop (pelayanan prima);
4. Meningkatkan fasilitas penciptaan iklim pasar dan menjamin penyediaan dan distribusi bahan pokok dengan harga wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
5. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
6. Meningkatkan pertumbuhan ekspor migas dan non migas;
7. Mewujudkan tertib usaha, tertib ukur dan tertib niaga dengan pemberian bantuan peralatan;
8. Peningkatan kualitas kelembagaan, usaha dan fasilitasi permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
9. Mengoptimalkan Program Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peningkatan kualitas pengelolaan UMKM/IKM dan Koperasi;
11. Peningkatan kualitas produksi UMKM/IKM dan Koperasi;
12. Meningkatkan dan menguatkan UMKM/IKM unggulan melalui peningkatan kemampuan UMKM/IKM dan penciptaan iklim usaha;

13. Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui promosi dan penguatan akses pasar;
14. Mendorong peningkatan produktifitas produksi, daya saing produk dan nilai tambah produk daerah agar dapat bersaing di pasar global;
15. Pengembangan fasilitas Industri;
16. Pengembangan Kawasan Industri Kecil Menengah.

Dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan maka ditetapkan arah kebijakannya, antara lain :

a. Urusan Wajib Koperasi

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi
2. Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
3. Peningkatan jumlah anggota koperasi.
4. Peningkatan peran UMKM dalam pengumpulan devisa melalui ekspor non migas melalui pengembangan SDM, mutu produksi serta desain dan kemasan.
5. Peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk percepatan pengembangan usaha UMKM .

b. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Peningkatan daya saing industri daerah melalui komoditi utama, kompetensi inti industri daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Mengembangkan industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan terutama agro industri dengan memprioritaskan pembinaan pada industri kecil, dan mikro.
3. Mengembangkan Komoditas dengan pendekatan pengembangan klaster industri berbasis komoditi unggulan dan prospektif

4. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai pada klaster industri yang bersangkutan.
5. Meningkatkan nilai tambah produk/hasil industri dan sumber daya yang digunakan industri.
6. Meningkatkan pengawasan produk industri dalam rangka pengawasan SNI.
7. Peningkatan industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan.
8. Peningkatan sarana dan prasarana industri.
9. Menumbuhkembangkan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif
10. Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar.
11. Pembangunan kawasan industri di Kecamatan Balikpapan Timur / Kota dalam rangka pengembangan sentra-sentra industri potensial.
12. Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
13. Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.
14. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi baik dalam negeri dan luar negeri.
15. Peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi.

c. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha atau menjamin tidak adanya praktek monopoli dalam aktivitas perdagangan.
3. Peningkatan pertumbuhan ekspor migas dan non migas berbasis produk unggulan daerah.

4. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah guna meminimalkan impor baik migas maupun non migas.
5. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.
6. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Industri.

5. Program Operasional

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan, yaitu:

a. Sekretariat

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi.

b. Urusan Wajib Koperasi

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;
- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 4) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi.

c. Urusan Pilihan Perindustrian

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- 4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Usaha Jasa Informal Mikro Kecil dan Menengah;

- 5) Program Pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga;
- 6) Program Penataan Struktur Industri.

d. Urusan Pilihan Perdagangan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut :

Tabel. 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan dan Kemitraan dalam pengembangan UMKM dan Koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)2. Jumlah Unit Simpan Pinjam (USP)
2	Berkembangnya Kawasan Industri dan Perdagangan yang berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Kawasan Industri2. Jumlah Luasan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan3. Jumlah Pertumbuhan Industri4. Jumlah Peserta Bimtek IKM5. Jumlah IKM yang memiliki Sertifikat Produk6. Jumlah SDM yang berkemampuan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
3	Meningkatnya Investasi dan Produk Sektor Unggulan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Produk Unggulan2. Jumlah Peralatan / Mesin3. Jumlah IKM Produktif (Formal +Non Formal)4. Jumlah IKM yang diberi bantuan fasilitas merk

4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kemetrolgian	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Perlindungan terhadap konsumen2. Persentase Peralatan Kemetrolgian3. Persentase UTTP yang telah ditera ulang4. Penurunan angka Pelanggaran Timbangan
5	Meningkatkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan dan Ketentuan yang berkaitan dengan investasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan2. Jumlah Sarana Perdagangan3. Jumlah Unit Usaha4. Jumlah Tenaga Kerja5. Jumlah Investasi Bidang Perdagangan
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan UMKM/IKM dan Koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Koperasi Aktif2. Jumlah SDM Pengurus Koperasi
7	Meningkatnya Kualitas Produk UMKM/IKM dan Koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah UMKM Produktif2. Jumlah SDM Pelaku UMKM
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan SDM Disperindagkop Kota Balikpapan (Pelayanan Prima)	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Bimtek Aparatur2. Jumlah Jaringan Informasi<ul style="list-style-type: none">- Buletin Indagkop- Banner di Media Masa- Profil Indagkop

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Program dan kegiatan tahun 2013 dituangkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang dananya bersumber dari APBD Kota Balikpapan terdapat 17 (tujuh belas) program, yang terdiri dari 4 (empat) program pada Urusan Wajib Sekretariat, 4 (empat) program pada Urusan Wajib Koperasi, 6 (enam) program pada Urusan Pilihan Perindustrian dan 3 (tiga) program pada Urusan Pilihan Perdagangan.

Adapun kegiatan yang dananya bersumber dari APBD secara garis besar adalah sebagai berikut : Program Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berasal dari APBD , APBD Provinsi dan APBN yang meliputi ;

1. Urusan Wajib Sekretariat

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 1.150.797.300,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 9) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana sebesar Rp. 333.799.919,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 3) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
 - 4) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 5) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,- yaitu Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- d. Program Penyebarluasan Informasi dengan dana sebesar 227.270.000, yaitu Kegiatan Visualisasi Informasi dan Penyusunan Buletin Warta Industri, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.

2. Urusan Wajib Kopersi

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dengan dana sebesar Rp. 442.168.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM
 - 2) Kegiatan Pendataan Ulang UMKN, Monitoring dan Evaluasi UMKM Kota Balikpapan

- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan dana sebesar Rp. 233.285.000.000,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM Kota Balikpapan
 - 2) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bagi Gakin

- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan dana sebesar Rp.750.585.000,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pertumbuhan/Pendirian Koperasi
 - 2) Kegiatan Operasional Dekopinda
 - 3) Kegiatan Diklat dan Magang Gerakan Koperasi
 - 4) Kegiatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi,Nasional dan Pameran Koperasi
 - 5) Pelatihan Koperasi

- d. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dengan dana sebesar Rp 201.960.000,- , yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
 - 2) Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 3) Pembelajaran Usaha Retail Koperasi
 - 4) Monitoring dan Evaluasi Dana Program Pemerintah

3. Urusan Pilihan Perdagangan

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan dana sebesar Rp 5.006.592.920,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengawasan Barang perdagangan
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Kemetrolgian
 - 4) Penyusunan Data dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembentukan UPTD Metrologi
 - 5) Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi (DAK dan Pendampingan)
 - 6) Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi (APP)

- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan dana sebesar Rp 170.683.800,, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan Informasi Pasar Perdagangan Luar Negeri
 - 2) Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
 - 3) Partisipasi Aktif dan Penyertaan Pameran Produk Unggulan UKM/IKM dan Produk Ekspor Kota Balikpapan

- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan dana sebesar Rp 630.032.400,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Monitoring Harga Pasar dan Distribusi Bahan Pokok
 - 2) Sosialisasi dan Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri
 - 3) Pengawasan Tata Niaga Perdagangan Dalam Negeri
 - 4) Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan
 - 5) Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan

4. Urusan Pilihan Perindustrian

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan dana sebesar Rp 50.000.000,- yaitu Kegiatan Kualitas Produk IKM melalui Bantuan Peralatan Produksi
- b. Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan dana sebesar Rp 726.448.500,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pelaku Industri Kecil Menengah
 - 2) Kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Data Industri Kota Balikpapan
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Paten dan Halal
 - 4) Kegiatan Pelatihan HKI Kerjasama dengan Klinik HKI
 - 5) Kegiatan Teknologi Produksi Industri Perikanan dan Kelautan
 - 6) Pelatihan dan Bantuan Kemasan Bagi IKM
- c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan dana sebesar Rp. 204.050.000,- yaitu Kegiatan Penyertaan dan Partisipasi Aktif Dalam Pameran Industri Mikro dan Kecil.
- d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Usaha Jasa Informal, Mikro Kecil dan Menengah dengan dana sebesar Rp. 345.270.000,- yaitu Kegiatan Penyertaan Promosi Produk UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Balikpapan.
- e. Program Pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga dengan dana sebesar Rp. 133.075.000,- yaitu kegiatan Promosi Produk Olahan Kota Balikpapan.
- f. Program Peningkatan Struktur Industri dengan dana sebesar Rp. 5.903.918.800,- yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Studi Kelayakan Gasifikasi di KIKS
 - 2) Kegiatan Pengembangan Daya Saing Produk daerah Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu
 - 3) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka
- i. Penciptaan Tenaga Kerja Industri



- 4) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Disperindagkop
- 5) Kegiatan Pelatihan dan Penerapan Alih Teknologi Tepat Guna di IKM Kota Balikpapan
- 6) Kegiatan Pengembangan Jejaring Bisnis Bagi Industri Kota Balikpapan
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Umum Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)
- 8) Kegiatan Diversifikasi Teknologi dan Proses Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)
- 9) Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Mutu Kota Balikpapan
- 10)Kegiatan Pelatihan dan Pemanfaatan Limbah Produksi Tahu Tempe di KIKS
- 11)Kegiatan Pembentukan Kelembagaan UPT-IIB
- 12)Kegiatan dan Penerapan Good House Keeping di IKM KIKS dan Kota Balikpapan
- 13)Kegiatan Revisi Amdal Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan (lanjutan 2012)
- 14)Kegiatan Pengembangan Rumah Produksi Industri Tahu/Tempe (Bantuan Keuangan Provinsi)
- 15)Kegiatan Pengadaan lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan (Bantuan Keuangan Provinsi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan dan akuntabel sebagai gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan serta kendala yang dihadapi dan pemecahan masalah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada periode tahun tertentu.

Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja serta mendukung terciptanya kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu pada Ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang difokuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disperindagkop Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, kemudian dituangkan dalam Belanja Langsung APBD Kota Balikpapan Tahun 2013.

Belanja Langsung APBD Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2013 merupakan pelaksanaan dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) program dan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan yang meliputi 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib serta 9 (sembilan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pada Urusan Pemerintahan Pilihan terdapat 1 (satu) kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat yaitu Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi dan 2 (dua) kegiatan bantuan APBD Provinsi yaitu Pengembangan Rumah Produksi Tahu/Tempe dan Pengadaan Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan. Sedangkan Belanja Langsung APBD Kota Balikpapan untuk bagian Sekretariat (Non Urusan) sebanyak 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut ini :

Tabel 8.
Program dan Kegiatan Bidang Koperasi Tahun Anggaran 2013

PROGRAM DAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
A.	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	
	1 Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM	104,974,000
	2 Pendataan Ulang UMKM, Monitoring, dan Evaluasi UMKM Kota Balikpapan	337,194,000
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	
	1 Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM Kota Balikpapan	145,735,000
	2 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bagi Gakin	87,550,000
C.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	
	1 Pertumbuhan dan Pendirian Koperasi	46,585,000
	2 Operasional Dekopinda	12,500,000
	3 Diklat dan Bimtek Pendamping Bagi Aparat	63,900,000
	4 Bimtek dan Magang Gerakan Koperasi	100,000,000
	5 Hari Koperasi Tingkat Provinsi, Nasional dan Pameran Koperasi	818,490,000
	6 Pelatihan Koperasi	27,600,000
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI	
	1 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	83,250,000
	2 Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi	11,935,000
	3 Pembelajaran Usaha RETAIL Koperasi	59,045,000
	4 Monitoring dan Evaluasi Dana Program Pemerintah	47,730,000
TOTAL BIDANG KOPERASI		Rp 1,946,488,000

Tabel 9.
Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2013

PROGRAM DAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
A.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	
	1 Peningkatan Pengawasan Barang Perdagangan	56,772,070
	2 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	-
	3 Penyusunan Data dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembentukan UPTD Metrologi	86,034,345
	4 Pelaksanaan Kegiatan Kemetrologian	205,725,906
	5 Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi (APP)	103,081,250
	6 Pelatihan Refaratir Metrologi	30,000,000
	7 Pengadaan Sarana Kemetrologian	196,400,000
B.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	
	1 Pengembangan Informasi Pasar Perdagangan Luar Negeri	55,306,000
	2 Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	5,090,200
	3 Partisipasi Aktif dan Penyertaan Promosi Produk Unggulan UKM/IKM dan Produk Ekspor Kota Balikpapan	144,184,400
C.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
	1 Monitoring Harga Pasar dan Distribusi Bahan Pokok	183,968,000
	2 Sosialisasi dan Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri	71,887,000
	3 Monitoring dan Evaluasi di Bidang Usaha Perdagangan dan Barang-Barang Beredar	39,045,200
	4 Pelaksanaan Kegiatan Kemetrologian	184,248,400
	5 Partisipasi Aktif dan Penyertaan Pameran Produk Unggulan UKM/IKM dan Produk Ekspor Kota Balikpapan	150,883,000
	6 Penyebaran Informasi Harga Pangan Strategis Kota Balikpapan	843,021,000
I	TOTAL	2,355,646,771
Program dan Kegiatan Perdagangan Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2013		
A.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	
	1 [Pembangunan Gedung Kantor Laboratorium Metrologi (DAK) Pusat	4,535,575,000
II	TOTAL Sumber Dana DAK Pusat	4,535,575,000
	TOTAL BIDANG PERDAGANGAN (I + II)	Rp 6,891,221,771

Tabel 10.
Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2013

PROGRAM DAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
A.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK PRODUKSI	
	1 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Bantuan Peralatan Produksi	50,000,000
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	
	1 Peningkatan Sumber Daya Pelaku Industri Kecil Menengah	369,550,000
	2 Evaluasi dan Pemutakhiran Data Industri Kota Balikpapan	51,000,000
	3 Fasilitasi Kepemilikan Sertifikasi Merk, Paten, Halal	47,550,000
	4 Pelatihan HKI Kerjasama dengan Klinik HKI	46,350,000
	5 Peningkatan Teknologi Produksi Industri Perikanan dan Kelautan	161,773,000
	6 Pelatihan dan Bantuan Kemasan Bagi IKM	50,225,500
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	
	1 Penyertaan dan Partisipasi Aktif dalam Pameran Produk Industri Kecil dan Mikro	224,775,000
D.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL USAHA JASA INFORMAL MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
	1 Penyertaan Promosi produk UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Balikpapan	432,934,900
	2 Lomba Desain Motif Batik Khas Balikpapan dan Bordir	120,285,000
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA	
	1 Promosi Produk Olahan Kota Balikpapan	133,075,000
F.	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	
	1 Penyusunan Studi Kelayakan Gasifikasi di KIKS	156,261,000
	2 Pengembangan Daya Saing Produk Daerah melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu	185,843,800
	3 Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Penciptaan Tenaga Kerja Industri	43,234,400
	4 Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Disperindagkop	75,000,000
	5 Pelatihan dan Penerapan Alih Teknologi Tepat Guna di IKM Kota Balikpapan	59,950,000
	6 Pengembangan Jejaring Bisnis Bagi Industri Kota Balikpapan	99,550,000
	7 Pemeliharaan Fasilitas Umum Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)	118,705,300
	8 Diversifikasi Teknologi dan Proses Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)	74,900,000



PROGRAM DAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
9	Diklat Teknis Pengelolaan IPAL/IPAB & Operasional Sistem Jaringan IPAL/IPAB di KIKS (Lanjutan)	40,000,000
10	Bantuan Fasilitas Merek Bagi Produk UKM Unggulan	50,000,000
11	DED Pembangunan Jaringan Air dan Listrik KIKS Tahap II	70,000,000
12	Pembinaan Teknologi & Produk/Penerapan Manajemen Mutu Konversi Gugus Kendali Mutu (GKM) UKM Kawasan Industri Kecil Sumber (KIKS), Inkubator Industri Bisnis (IIB) dan IKM Kota Balikpapan	200,000,000
13	Seminar Nasional dan Visualisasi Inovasi Teknologi Industri & Produk IK KIKS dan Kota Balikpapan	100,000,000
14	Pengadaan Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan Tahap II	2,000,000,000
TOTAL I		Rp 5,892,664,000
Program dan Kegiatan Peindustrian Sumber Dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2013		
A.	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	
1	Pengembangan Rumah Produksi Industri Tahu/Tempe	3,500,000,000
2	Pengadaan Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan	850,000,000
TOTAL Sumber Dana Bantuan Provinsi (II)		4,350,000,000
TOTAL BIDANG PERINDUSTRIAN (I + II)		Rp 10,242,664,000



➤ PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT (NON URUSAN)

Tabel 11.
Program dan Kegiatan Sekretariat Tahun Anggaran 2013

PROGRAM / KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63,635,000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207,600,000
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83,033,500
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	66,652,800
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,118,000
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	18,093,000
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,440,000
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	145,225,000
	9 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	650,000,000
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	119,839,191.00
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100,490,728.00
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5,250,000.00
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15,000,000.00
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8,730,000.00
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	84,490,000.00
C.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	
	1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10,000,000
D.	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI DAERAH	
	1 Visualisasi Informasi dan Penyusunan Buletin Industri, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan	227,270,000
TOTAL SEKRETARIAT		Rp 1,871,867,219

Dari tabel-tabel di atas maka didapat penjabaran sebagai berikut :

I Belanja Langsung Sumber Dana APBD Kota Balikpapan

Bidang Koperasi (Urusan Pemerintahan Wajib)	Rp. 1.946.488.000,-
Bidang Perdagangan (Urusan Pemerintahan Pilihan)	Rp. 2.365.647.571,-
Bidang Perindustrian (Urusan Pemerintahan Pilihan)	Rp. 5.241.437.200,-
Sekretariat (Non Urusan)	Rp. 1.871.867.219,-



II	Belanja Langsung Sumber Dana DAK Pusat	
	Bidang Perdagangan (Urusan Pemerintahan Pilihan)	Rp. 4.535.575.000,-
III	Belanja Langsung Sumber Dana APBD Provinsi	
	Bidang Perindustrian (Urusan Pemerintahan Pilihan)	Rp. 4.350.000.000,-

TOTAL ANGGARAN TAHUN 2013 **Rp 20.301.014.000,-**

Berikut akan diuraikan informasi pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan dan Kemitraan dalam Pengembangan UMKM dan Koperasi

Tabel 12

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	12	15	125	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah. a. Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM Kota Balikpapan. b. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bagi Gakin
2. Jumlah Unit Simpan Pinjam	281	395	140	
3. Jumlah Gakin yang mengikuti Bimtek	200	200	100	

Dari table di pencapaian Sasaran Strategis 1 di atas dapat dikatakan **berhasil** dan memenuhi target. Lembaga keuangan memiliki bagian penting pada pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan demikian sangatlah penting bagi Disperindagkop Kota Balikpapan untuk mendorong memonitor, dan merawat lembaga keuangan yang sudah ada agar terus dapat

memberikan manfaatnya bagi ekonomi khususnya UMKM Kota Balikpapan. Jumlah lembaga keuangan yang sehat ini dinilai **baik**. Berikut data perbandingan pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Unit Simpan Pinjam (USP)

Tabel 13.
Pertumbuhan LKM dan USP

URAIAN	CAPAIAN 2011	CAPAIAN 2012	CAPAIAN 2013
1 Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) / Koperasi Simpan Pinjam	10 Unit/KSP	15 Unit/KSP	15 Unit/KSP
2 Jumlah USP (Unit Simpan Pinjam)	267 Unit/USP	379 Unit/USP	395 Unit/USP

Sasaran 2 : Berkembangnya Kawasan Industri dan Perdagangan yang berwawasan Lingkungan

Tabel 14

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah Kawasan Industri	2	2	100	1. Penataan Struktur Industri a. Penyusunan Studi Kelayakan Gasifikasi di KIKS. b. Amdal Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan (lanjutan 2012).
2. Persentase Luasan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan	4.6	4.6	100	
3. Jumlah Dokumen (Kerangka Acuan ANDAL KIK, Dokumen ANDAL KIK, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan KIK dan Dokumen Rencana Pemantauan KIK)	120	120	100	



4. Jumlah IK yang menerapkan Sistem manajemen Mutu	20	15	75	c. Pengembangan Daya Saing Produk Daerah Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu.
5. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil yang siap pakai	100	20	20	d. Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Penciptaan Tenaga Kerja Industri.
6. Tingkat Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	3	5	166	e. Pelatihan dan Penerapan Alih Teknologi Tepat Guna di IKM Kota Balikpapan.
7. Jumlah Operator, IK KIKS dan IKM Kota Balikpapan yang memahami Teknologi Gasifikasi untuk Industri Kecil	20	20	100	
8. Jumlah kerjasama yang terjalin antar IKM Kota Balikpapan dengan IKM dan Instansi Pemerintah Luar Kota	10	10	100	g. Pengembangan Jejaring Bisnis Bagi Industri Kota Balikpapan
9. Persentase terbentuknya "Koperasi 10 Kota"	100	80	80	
10. Jumlah Jaringan Air Bersih yang terbangun di IIB	4	3	75	h. Pemeliharaan Fasilitas Umum Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)
11. Jumlah IIB yang menerapkan Diversifikasi Teknologi	9	4	44	i. Diversifikasi Teknologi dan Proses Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)
12. Jumlah Dokumen Konsep Kelembagaan Mutu Kota Balikpapan	1	1	100	j. Pembentukan Kelembagaan Mutu Kota Balikpapan



13. Jumlah Operator KIKS, IK KIKS, IK Kota Balikpapan yang memahami Teknis Pemanfaatan Limbah Produksi Tahu Tempe	20	20	100	k. Pelatihan dan Pemanfaatan limbah Produksi Tahu Tempe di KIKS
14. Jumlah Dokumen Konsep Kelembagaan UPT-IIB	1	1	100	l. Pembentukan Kelembagaan UPT -IIB
15. Jumlah IKM yang Menerapkan Good Housekeeping di IKM KIKS	20	18	90	m. Pelatihan Penerapan Good Housekeeping di IKM KIKS dan Kota Balikpapan
16. Jumlah Rumah Tinggal dan Rumah Produksi Tahu/Tempe	15	15	100	n. Pengembangan Rumah Produksi Industri Tahu/Tempe (bantuan Keuangan Provinsi)
17. Jumlah Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan	1	1	100	o. Pengadaan Lahan Kawasan Industri Kecil dan Menengah p. Pengadaan Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan Tahap II
18. Persentase Pertumbuhan Industri	4,75	4,75	100	2. Pengembangan Industri Kecil Menengah a. Evaluasi dan Pemuktahiran Data Industri Kota Balikpapan Tahun 2013 b. Peningkatan Teknologi Produksi Industri Perikanan dan Kelautan
19. Jumlah IKM Aktif yang terdata	770	406	52	
20. Jumlah Peserta Bimtek	6	6	100	
21. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi Industri Perikanan dan Kelautan	20	20	100	

Kawasan Industri Kariangau dimana luasannya semula 1500 hektare menjadi 3500 hektare maka diperlukan membuat kajian AMDAL yang baru sebagai landasan untuk mengelola ekosistem utamanya menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Kajian lingkungan diperlukan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bermuara pada pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tim teknis kegiatan ini berasal dari BLH, Badan Pertanahan, Bappeda, Administrasi Pelabuhan, Dinas Tata Kota dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Disperindagkop Kota Balikpapan. Kegiatan Amdal Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan di tahun 2013 ini merupakan kelanjutan kegiatan tahun 2012.

Adapun pekerjaan yang **berhasil** dicapai adalah menyusun dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Kawasan Industri Kecil Kariangau sebanyak 30 dokumen;
- Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) KIK sebanyak 30 dokumen;
- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) KIK sebanyak 30 dokumen;
- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) KIK sebanyak 30 dokumen.

Kawasan industri kecil di Kota Balikpapan saat ini hanya 1 (satu) kawasan yaitu Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS). Melalui program Penataan Struktur Industri luas kawasan 9 (sembilan) hektare berhasil dikelola seluas 3(tiga) hektare (Tahap I), dimana yang telah berhasil dibangun (Tahap I) adalah :

- 60 (enam puluh) unit rumah produksi dan rumah tinggal untuk industri kecil tahu tempe;
- Instalasi Jaringan Air Bersih;
- Pengelolaan Air Bersih (IPAB);
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- Jaringan Listrik Non PLN;
- Tempat Ibadah (Masjid) dan sarana pendukung lainnya.

Tahun 2012 telah disusun DED (Detail Engineering Design) rumah produksi dan rumah tinggal industri kecil tahu tempe untuk tahap II. Pembangunan rumah produksi dan rumah tinggal pada Tahap II ini ditargetkan mencapai 15 (lima belas) unit dimana dana merupakan bantuan dari Provinsi Kalimantan Timur. Target ini **berhasil** terpenuhi dengan terbangunnya 15 unit rumah produksi dan rumah tinggal tahu tempe di tahun 2013 ini.

Pembangunan Jaringan air bersih di Inkubator Industri & Bisnis (IIB) di targetkan dapat terbangun sebanyak 4 jaringan. Akan tetapi Pihak PDAM melalui surat tertulis menyatakan hanya dapat menyanggupi membangun 3 jaringan air bersih. Hal ini disebabkan pada daerah yang akan dibangun belum terdapat pipa distribusi dengan \emptyset 2", 3" atau 4". Berikut nama IIB yang telah berhasil dibangun jaringan air bersih :

- IIB Kue Basah dan Kering, Jl.Kutilang Gn.Bahagia
- IIB Bengkel Motor, Jl.Gn. Empat RT.02 Kel.Margomulyo
- IIB Sablon, Jl.P.Antasari RT.63 Kel.Karang Rejo

Di tahun 2013 Disperindagkop Kota Balikpapan juga **berhasil** membekali sebanyak 30 IKM dengan teknologi gasifikasi. Adanya teknologi gasifikasi ini memberikan alternative bahan bakar lain yang dapat meningkatkan produktivitas bagi pelaku industri kecil menengah.

Hal lain yang menarik adalah berhasilnya dibangun 10 jalinan kerjasama antara IKM Kota Balikpapan dengan IKM juga Instansi Pemerintah yang ada di pulau Jawa. Dengan demikian biaya produksi dapat makin ditekan dan pemasaran produk lebih luas. Oleh karena itulah dibentuk "Koperasi 10 Kota" bagi IKM Kota Balikpapan.

Gugus Kendali Mutu "KILO" yang dibina Disperindagkop Kota Balikpapan mendapat penghargaan sebagai Gugus Kendali Mutu Terbaik Tingkat Nasional. Fasilitator GKM "KILO", Lely Fajarwati, bagian dari IKM "Serai Wangi" ini juga mendapat penghargaan sebagai "Fasilitator Terbaik".



INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
15. Jumlah IKM yang Menerapkan Good Housekeeping di IKM KIKS	0	18
16. Jumlah Rumah Tinggal dan Rumah Produksi Tahu/Tempe	0	15
17. Jumlah Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan	0	1
18. Persentase Pertumbuhan Industri	4,07	4,75
19. Jumlah IKM Aktif yang terdata	200	406
20. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi Industri Perikanan dan Kelautan	25	20

Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi dan Produk Sektor Unggulan Daerah

Tabel 16

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah Produk Unggulan (Komoditi)	2	6	300	1. Pengembangan Industri Kecil Menengah a. Peningkatan Sumber Daya Pelaku Industri Kecil Menengah b. Fasilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Paten dan Halal c. Pelatihan HKI Bekerjasama dengan Klinik HKI
2. Jumlah IKM yang Memiliki Sertifikat	12	11	91	
3. Persentase Produk Bersertifikat	2	2	100	
4. Jumlah IKM Produktif (Formal & Non Formal)	4.037	3.795	94	
5. Jumlah IKM yang memiliki Sertifikat HKI	20	16	80	



6. Jumlah IKM yang Mendapat Bantuan Kemasan	4	0	0	d. Pelatihan dan Bantuan Kemasan Bagi IKM
7. Jumlah Peralatan/Mesin	36	33	91	2. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi a. Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Bantuan Peralatan Produksi
8. Jumlah Pameran dan IKM yang mengikuti Pameran	2 ; 6	2 ; 6	100	3. Peningkatan Pemasaran Hasil Usaha Jasa Informal, Mikro, Kecil dan Menengah
9. Jumlah IKM Batik yang tumbuh	5	5	100	a. Penyertaan Promosi Produk UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional Kota Balikpapan
10. Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Batik dan Bordir	50	50	100	
11. Jumlah Desain Batik	100	69	69	b. Lomba Desain Batik Khas Balikpapan dan Lomba Bordir
12. Persentase Peningkatan Penjualan Produk IKM	25	25	100	4. Pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga a. Promosi Produk Olahan Kota Balikpapan 5. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah a. Penyertaan dan Partisipasi Aktif dalam Pameran Produk Industri Mikro dan Kecil

Guna mendukung kualitas dan kuantitas produksi yang baik, Disperindagkop Kota Balikpapan memberikan bantuan peralatan / mesin bagi IKM sebanyak 33 (tiga puluh tiga) mesin kepada IKM Kota Balikpapan yaitu:

- Kompor Batik Listrik sebanyak 25 buah ;
- Alat Pengemasan (Pedal Sealer) 1 unit;
- Alat/Mesin Pengolahan Produk (Spinner) 1 unit;
- Alat/Mesin Pengolahan Kopi (Grinder Kopi) 1 unit;
- Alat/Mesin Pengolahan Produk (Penggilingan) 2 unit;
- Dandang 3 unit.

Melalui kegiatan Fasilitasi Merek bagi Produk Unggulan, Disperindagkop Kota Balikpapan **berhasil** memfasilitasi sebanyak 11 IKM/UKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Semula target 12 IKM/UKM yang akan difasilitasi, namun 1 IKM tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk bantuan merek dan paten tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan dana.

Terciptanya hubungan antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan, dengan Klinik HKI Ditjen IKM Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, telah **berhasil** member pelatihan dan memfasilitasi sertifikat HKI untuk 20 IKM .

Melaui kegiatan Pelatihan dan Bantuan Kemasan bagi IKM, diharapkan setidaknya 4 IKM dapat diberi bantuan kemasan. Akan tetapi target ini masih **gagal** dikarenakan IKM tersebut **belum** memiliki TDI (Tanda Daftar Industri). Namun setidaknya 20 IKM **berhasil** diberi pelatihan kemasan bagi IKM.

Pelatihan Batik dan Bordir yang telah diberikan Disperindagkop Kota Balikpapan diikuti oleh 25 orang peserta batik dan 25 orang peserta pelatihan border. Tidak sampai disitu, pelatihan ini **berhasil** menciptakan sebanyak 5 IKM batik yang baru dan 5 IKM border.

Promosi dan pameran-pameran yang diikuti IKM/UKM Kota Balikpapan juga **berhasil** meningkatkan penjualan sebanyak 25%.

Berikut pencapaian sasaran Strategis 3 jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu :

Tabel 17

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Jumlah Produk Unggulan (Komoditi)	10	6
2. Jumlah IKM yang Memiliki Sertifikat (Halal)	0	11
3. Persentase Produk Bersertifikat	0	2
4. Jumlah IKM Produktif (Formal & Non Formal)	3.793	3.795
5. Jumlah IKM yang memiliki Sertifikat HKI	0	16
6. Jumlah IKM yang Mendapat Bantuan Kemasan	0	0
7. Jumlah Peralatan/Mesin	31	33
8. Jumlah IKM Batik yang tumbuh	0	5
9. Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Batik dan Bordir	0	50
10. Jumlah Desain Batik	63	69
11. Persentase Peningkatan Penjualan Produk IKM	20	25

Sasaran 4 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kemetrolgian.**Tabel 18**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	80	70	87	1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Peningkatan Pengawasan Bidang Perdagangan b. Pengadaan Sarana Kemetrolgian c. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen d. Penyusunan Data dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembentukan UPTD Metrologi e. Pelaksanaan Kegiatan Kemetrolgian f. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi (DAK dan Pendampingan) g. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi (APP) h. Pelatihan Refaratir Metrologi
2. Persentase Peralatan Kemetrolgian	60	60	100	
3. Persentase Angka Pelanggaran Timbangan	7.5	7.5	100	
4. Persentase UTTP yang telah ditera ulang	100	100	100	
5. Persentase Pengawasan Barang Beredar	60	60	100	
6. Persentase Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus	60	60	100	
7. Persentase Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi	100	100	100	
8. Jumlah Reparatur UTTP yang Baru dan Bersertifikat	20	20	100	

Untuk terus meningkatkan persentase perlindungan terhadap konsumen, sarana dan prasana kemetrolagian terus dilakukan. Dengan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat di tahun 2013 persentase peralatan kemetrolagian **berhasil** tercapai 60% dengan mengadakan berbagai peralatan utama, pendukung dan mobil operasional kegiatan metrologi. Pembangunan gedung UPTD Metrologi Kota Balikpapan dan Laboratorium Metrologi juga **berhasil** 100% dibangun dimana tahun sebelumnya pembangunan belum terlaksanakan dikarenakan terhambat dengan lokasi yang akan digunakan.

Tahun 2013, Disperindagkop Kota Balikpapan melakukan pengawasan terhadap 9.796 buah alat UTTP dengan wajib tera sebanyak 1.995 orang. Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus menemukan sebanyak 35 produk yang melanggar. Kegiatan tera ulang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Alat UTTP yang ditera ulang pada tahun 2013 sebanyak 1.667 buah bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 4.360 buah. Ini berarti menunjukkan penurunan sebanyak 1175 buah atau 26%.
- b. Wajib tera yang datang sebanyak 418 orang bila dibandingkan tahun 2012 yaitu 976 orang yang berarti mengalami penurunan sebanyak 558 orang atau 57%.

Hasil kegiatan ukur ulang yang dilaksanakan diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah konsumen yang diukur ulang sebanyak 89 toko
- b. Jumlah belanjaan yang diukur ulang sebanyak 954 buah
- c. Jumlah belanjaan dengan timbangan normal (pas) sebanyak 880 buah
- d. Jumlah pelanggaran sebanyak 66 buah

Banyaknya alat UUTP yang beredar di Kota Balikpapan dan wajib tera yang harus dilayani sangat tidak sebanding dengan SDM aparat yang melayani. Diperlukan penambahan aparat pada Disperindagkop Kota Balikpapan, khususnya tim Metrologi. Hal ini sudah lama dirasakan, sehingga diadakan Pelatihan Reparatur Metrologi. Hasilnya cukup memuaskan karena buah dari kegiatan tersebut melahirkan sebanyak 20 orang reparatur baru yang bersertifikat.

Berikut pencapaian sasaran Strategis 4 jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu :

Tabel 19

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	70	70
2. Persentase Peralatan Kemetrolgian	50	60
3. Persentase Angka Pelanggaran Timbangan	22	7.5
4. Persentase UTTP yang telah ditera ulang	80	100
5. Persentase Pengawasan Barang Beredar	60	60
6. Persentase Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus	60	60
7. Persentase Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi	50	100
8. Jumlah Reparatur UTTP yang Baru dan Bersertifikat	0	20

Sasaran 5 : Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan dan Ketentuan yang berkaitan dengan investasi

Tabel 20

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan	2.802.855.198.16	1.820.598.644.16	64	1. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Pengembangan Informasi Pasar Perdagangan Luar Negeri b. Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri c. Partisipasi Aktif dan
2. Jumlah Buku Profil Perdagangan Luar Negeri	50	50	100	
3. Jumlah Pameran yang diikuti	2	2	100	



4. Jumlah Sarana Perdagangan				Penyertaan Pameran Produk Unggulan UKM/IKM dan Produk Ekspor Kota Balikpapan.
-Pasar Tradisional	17	16	95	
-Pasar Lokal	0	0	0	
-Pasar Regional	0	0	0	
-Pasar Swalayan	0	0	0	
-Toko Modern				
Hypermarket	1	1	100	
Supermarket	18	18	100	
Mini Market	94	94	100	
-Pasar Grosir	1	1	100	
-Mall/Plaza	7	7	100	
5. Jumlah Unit Usaha	18.239	19.017	142	1. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Evaluasi Harga Pasar dan Distribusi Bahan Pokok b. Sosialisasi dan Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri c. Pengawasan Tata Niaga Perdagangan Dalam Negeri d. Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan e. Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan f. Penyebaran Informasi Harga Pangan Strategis Kota Balikpapan
6. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	112.798	112.898	188	
7. Jumlah Investasi Bidang Perdagangan	4.160.661	7.116.821	171	
8. Persentase Tertibnya Penjualan Minuman dan Bahan Berbahaya	75	75	100	
9. Jumlah Draft Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	1	1	100	
10. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan	13	5	38	
11. Papan Informasi Harga Pangan Pasar Strategis	2	2	100	

Ekspor bersih perdagangan (migas dan non migas) di tahun 2013 tidak mencapai target dan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Dari data pada halaman selanjutnya dapat dilihat ekspor bersih turun sebanyak 24%.

Tabel 21
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Balikpapan

No	Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
1	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor-Nilai Impor)	2,241,437,888.61	3,096,726,342.80	3,228,751,383.64	2,423,021,553.80	1,820,598,644.16

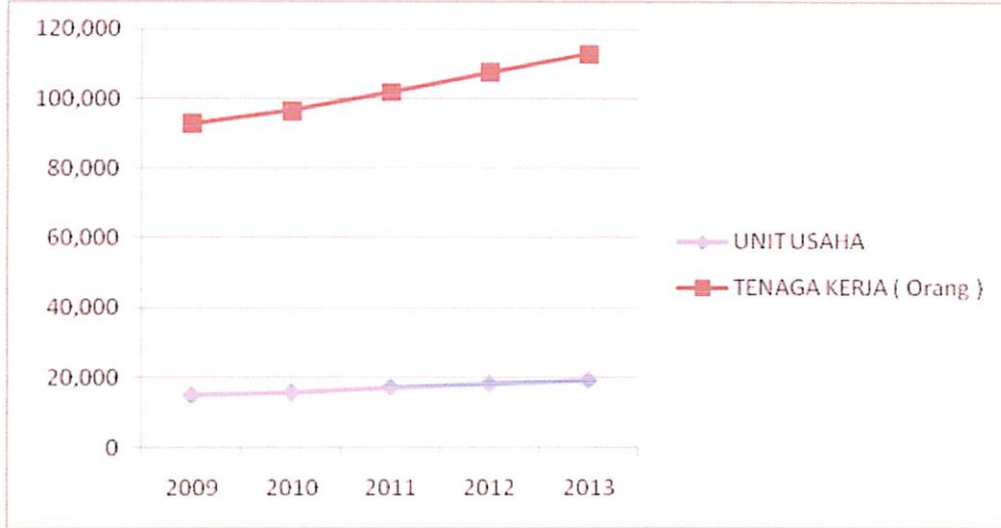


Pertumbuhan sektor perdagangan sangat baik dan kompetitif bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dan perkembangan sarana perdagangan, unit usaha, tenaga kerja dan investasi tiap tahunnya. Unit usaha perdagangan yang bertumbuh mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak lagi, dan ini turut mempengaruhi ekonomi atau kesejahteraan Kota Balikpapan, minimal dapat menekan angka pengangguran. Dari table dibawah ini akan terlihat bahwa pertumbuhan unit usaha perdagangan **meningkat** sebanyak 5.7% dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5% dan investasi meningkat sebesar 20%.

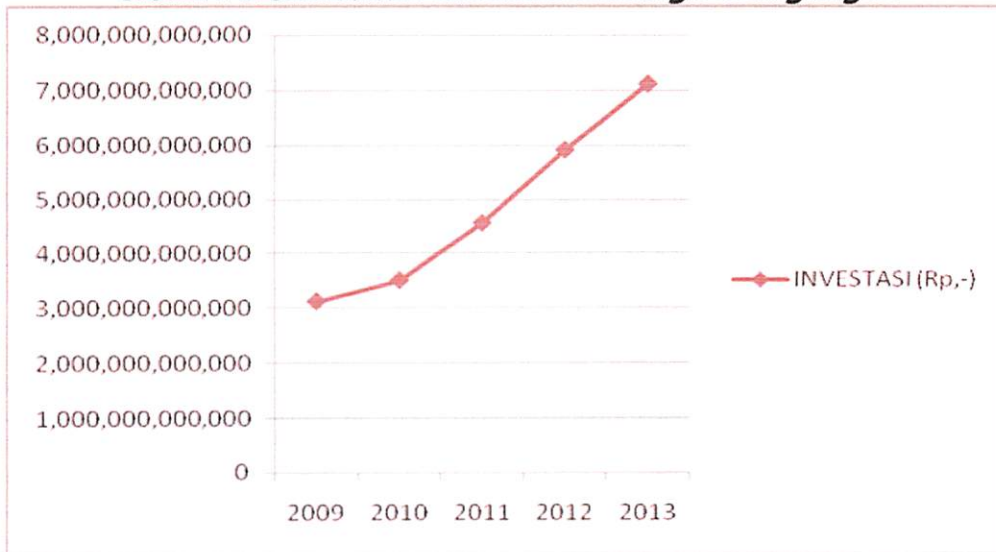
Tabel 22
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Balikpapan

No	Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
1	Unit Usaha	14,763	15,562	16,941	17,981	19,017
2	Tenaga Kerja (orang)	92,705	96,380	101,750	107,480	112,898
3.	Investasi (Rp,-)	3,110,894,161,876	3,495,767,602,418	4,552,262,179,881	5,906,715,558,242	7,116,821,538,641

Grafik Pertumbuhan Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Perdagangan



Grafik Pertumbuhan Investasi Bidang Perdagangan



Tahun 2013, terhadap bahan berbahaya kurang maksimal berjalan. Hal ini dikarenakan **kurangnya** jumlah SDM/Aparatur Disperindagkop Kota Balikpapan. Saat ini tercatat sebanyak 42 (empat puluh dua) hotel yang perlu terus dilakukan pengawasan legalitas minuman ber-alkohol. Dibutuhkan penambahan aparatur pada tubuh bidang perdagangan mengingat begitu pentingnya tertib legalitas minuman ber-alkohol dan bahan berbahaya tersebut.

Monitoring bahan pokok yang dilakukan Disperindagkop Kota Balikpapan guna menyajikan informasi tiap bulannya mengenai harga dan pasokan bahan pokok kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini, **terpenuhi** tiap bulannya dan dapat menekan kenaikan harga bahan pokok (agar tidak sampai mengalami kenaikan hingga 25%).

Berikut pencapaian sasaran Strategis 5 jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu :

Tabel 23

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan	2.423.021.553,80	1.820.598.644.16
2. Jumlah Buku Profil Perdagangan Luar Negeri	50	50
3. Jumlah Pameran / Misi Dagang yang diikuti	2	2
4. Jumlah Sarana Perdagangan		
-Pasar Tradisional	16	16
-Pasar Lokal	0	0
-Pasar Regional	0	0
-Pasar Swalayan	0	0
-Toko Modern		
Hypermarket	1	1
Supermarket	18	18
Mini Market	70	94
-Pasar Grosir	0	1
-Mall/Plaza	7	7
5. Jumlah Unit Usaha	17.981	19.017
6. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	107.480	112.898
7. Jumlah Investasi Bidang Perdagangan	5.906.715	7.116.821
8. Persentase Tertibnya Penjualan Minuman dan Bahan Berbahaya	60	75
9. Jumlah Draft Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	0	1



INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
10. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan	24	5
11. Papan Informasi Harga Pangan Pasar Strategis	0	2

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan UMKM/IKM dan Koperasi

Tabel 24

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah Koperasi Aktif	385	410	118	1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Pertumbuhan/Pendirian Koperasi b. Operasional Dekopinda c. Diklat dan Bimtek Pendamping Bagi Aparat d. Bimtek dan Magang Gerakan Koperasi e. Hari Koperasi Tingkat Provinsi, Nasional dan Pameran Koperasi f. Pelatihan Koperasi
2. Peningkatan SDM Pengurus Koperasi	190	200	105	
3. Jumlah Aparatur Pendamping	7	7	100	
4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi Tingkat Propinsi	100	100	100	
5. Jumlah Kelurahan yang mendapat Pelatihan Koperasi	34	34	100	
6. Jumlah Koperasi Sehat	281	395	140	2. Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi a. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi b. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi c. Pembelajaran Usaha Retail Koperasi d. Monitoring dan Evaluasi Dana Program Pemerintah
7. Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pembelajaran Usaha Retail Koperasi	9	9	100	
8. Persentase Monitoring dan Evaluasi Dana Program Pemerintah	100	100	100	

Beberapa **kendala-kendala** yang dihadapi dalam pembinaan UMKM/IKM/Koperasi antara lain :

- Sumber Daya Manusia (SDM) / jumlah petugas yang masih terbatas;
- Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pelayanan ;
- Belum memiliki balai pelatihan/gedung khusus bagi UMKM/IKM/Koperasi (kaitan erat pada pencapaian sasaran strategis sebelumnya yang telah dibahas);
- Kurangnya inisiatif dan kemandirian pelaku UMKM/IKM/Koperasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Disperindagkop Kota Balikpapan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut adalah :

- Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelaku UMKM/IKM/Koperasi;
- Mengakomodir kebutuhan UMKM/IKM/Koperasi sesuai program yang ditetapkan;
- Membekali pelaku UMKM/IKM/Koperasi dengan pelatihan maupun studi banding;
- Memberikan *reward* kepada pelaku UMKM/IKM/Koperasi yang berhasil dan memenuhi syarat.

Berikut pencapaian sasaran Strategis 6 jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu :

Tabel 25

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Jumlah Koperasi Aktif	331	410
2. Peningkatan SDM Pengurus Koperasi	190	200
3. Jumlah Aparatur Pendamping	7	7
4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi Tingkat Propinsi	100	100
5. Jumlah Kelurahan yang mendapat Pelatihan Koperasi	27	34



INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
6. Jumlah Koperasi Sehat	331	395
7. Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pembelajaran Usaha Retail Koperasi	9	9
8. Persentase Monitoring dan Evaluasi Dana Program Pemerintah	80	100

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Produk UMKM/IKM dan Koperasi**Tabel 26**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah UMKM Produktif	14.770	19.017	128	1. Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif a. Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM. b. Pendataan Ulang UMKM, Monitoring dan Evaluasi UMKM Kota Balikpapan.
2. Peningkatan SDM Pelaku UMKM (Diklat Pelaku UMKM)	300	345	115	

Berikut pencapaian sasaran Strategis 7 jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu :

Tabel 27

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Jumlah UMKM Produktif	14.645	19.017
2. Peningkatan SDM Pelaku UMKM (Diklat Pelaku UMKM)	275	345



**Sasaran 8 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan SDM
Disperindagkop Kota Balikpapan (Pelayanan Prima)**

Tabel 28

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah Bimtek Aparatur	6	5	83	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Penyediaan Perlengkapan, Makan Minum, ATK, Jasa Kebersihan, dll (Indagkop) b. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
2. Persentase Kecukupan Sarana Operasional Perkantoran yang dibutuhkan	10	100	100	
3. Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah/Luar Daerah	71	57	80	
4. Persentase Kecukupan Sarana Prasarana Operasional Kantor yang diperlukan	100	98	98	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Penyediaan Perlengkapan, Peralatan Kantor dan Jasa Pemeliharaan, dll (Indagkop)
5. Persentase Peningkatan Pengetahuan SDM Penyuluh Perindagkop	75	30	40	1. Penataan Struktur Industri a. Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Disperindagkop
6. Jumlah Jaringan Informasi - Buletin Indagkop - Banner di Media Masa - Profil Indagkop	2000 48 1	2000 48 1	100 100 100	3. Penyebarluasan Informasi Daerah a. Pembuatan Media Indagkop, Publikasi di Media Cetak dan Profil Indagkop
7. Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang disusun	21	21	100	4. Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan bimbingan teknis bagi aparatur/SDM Disperindagkop Kota Balikpapan sehingga performa ataupun kualitas SDM semakin meningkat. Adapun bimbingan teknis yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis perencanaan, keuangan, manajemen kearsipan, bimtek perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan diklat pendampingan bagi aparat (bidang koperasi).

Pelayanan prima yang juga diwujudkan pada ketersediaan informasi indagkop berbasis cetak yaitu "Bulletin Indagkop" dan banner di media massa yang **berhasil** terbit tiap bulannya selama tahun 2013. Profil perdagangan dalam negeri dan luar negeri **berhasil** diwujudkan dalam bentuk cetak (buku/dokumen). Mengingat perkembangan teknologi dan penyebaran informasi berbasis website ini cukup efektif, diharapkan media informasi Disperindagkop Kota Balikpapan berbasis website dapat diupayakan dan diwujudkan di tahun berikutnya. Penyebaran informasi ini juga erat kaitannya dengan promosi baik itu bagi UMKM maupun IKM.

Berikut pencapaian sasaran Strategis 8 jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu :

Tabel 29

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Jumlah Bimtek Aparatur (Bimtek)	5	5
2. Persentase Kecukupan Sarana Operasional Perkantoran yang dibutuhkan	100	100
3. Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah/Luar Daerah	71	57
4. Persentase Kecukupan Sarana Prasarana Operasional Kantor yang diperlukan	85	98
5. Persentase Peningkatan Pengetahuan SDM Penyuluh Perindagkop	25	30
6. Jumlah Jaringan Informasi		
- Buletin Indagkop	1000	2000
- Banner di Media Masa	0	48
- Profil Indagkop	0	1



INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
7. Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang disusun	21	21

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 secara umum dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table 30

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan dan Kemitraan dalam Pengembangan UMKM dan Koperasi	1. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) / KSP (Koperasi Simpan Pinjam)	12	15	125
	2. Jumlah Unit Simpan Pinjam (USP)	281	395	140
Berkembangnya Kawasan Industri dan Perdagangan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah Kawasan Industri	2	2	100
	2. Persentase Luasan Kawasan Industri yang berwawasan Lingkungan	4,6	4,6	100
	3. Tingkat Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	3	5	160
	4. Persentase Jumlah Pertumbuhan Industri	4,75	4,75	100
Meningkatnya Investasi dan Produk Sektor Unggulan Daerah	1. Jumlah Produk Unggulan (Komediti)	2	6	300
	2. Jumlah IKM Produktif (Formal & Non Formal)	4.037	3.795	94
	3. Jumlah Peralatan/Mesin	36	33	91
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kemetrolgian	1. Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	80	70	87
	2. Persentase Peralatan Kemetrolgian	60	60	100
	3. Persentase Angka Pelanggaran Timbangan	7,5	7,5	100
	4. Persentase Alat UTTP yang ditera Ulang	100	100	100
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan dan Ketentuan yang berkaitan dengan Investasi	1. Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan (Juta Dollar)	2.802	1.820	65
	2. Jumlah Sarana Perdagangan			
	Pasar Tradisional	17	17	100
	Pasar Lokal	0	0	
	Pasar Regional	0	0	
	Pasar Swalayan	0	0	
	Toko Modern :			
	Hypermart	1	1	100
Supermarket	18	18	100	
Mini Market	94	94	100	
Pasar Grosir	1	1	100	



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 83 / 09 / DISPERINDAGKOP / 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam Renstra DISPERINDAGKOP Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Renstra DISPERINDAGKOP Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama DISPERINDAGKOP Kota Balikpapan 2011-2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala DISPERINDAGKOP Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama dari Renstra DISPERINDAGKOP Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala DISPERINDAGKOP.

- tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
 11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan tanggal 27 Oktober 2008;
 12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 2009;
 13. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 tanggal 26 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Stategis (Renstra) DPKP Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah bagian dari dokumen perencanaan strategis DISPERINDAGKOP Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama DISPERINDAGKOP Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala DISPERINDAGKOP.

Pasal 2

DISPERINDAGKOP Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 07 Tahun 2013.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal : 21 Pebruari 2014

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI**



KOTA BALIKPAPAN

Doortje Marpaung
**Dra. DOORTJE MARPAUNG, MM
NIP 19630108 198910 2 001
Pembina Utama Muda**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DOORTJE SORTA SUSANI MARPAUNG**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDAGKOP KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

DOORTJE SORTA SUSANI MARPAUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2011-2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan dan Kemitraan dalam Pengembangan UMKM	1 Jumlah LKM (Lemabaga Keuangan Mikro) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 2 Jumlah Unit Simpan Pinjam (USP)	Rekapitulasi Koperasi Rekapitulasi Koperasi
2	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1 Jumlah Kawasan Industri 2 Jumlah Luasan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan 3 Persentase Pertumbuhan Industri 6 Jumlah SDM yang berkemampuan Pemanfaatan teknologi tepat guna	Laporan hasil pendataan Laporan hasil pendataan Laporan hasil pendataan Laporan pelaksanaan kegiatan
3	Meningkatnya Investasi dan Produk Sektor Unggulan Daerah	1 Jumlah Produk Unggulan 2 Jumlah Peralatan / Mesin 3 Jumlah IKM Produktif (Formal+Non Formal)	Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan hasil Pendataan
4	Tersedianya sarana dan prasarana kemetrolgian	1 Persentase perlindungan terhadap konsumen 2 Persentase peralatan kemetrolgian 3 Persentase Angka Pelanggaran Timbangan 4 Persentase UTP yang ditera ulang	Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan
5	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan investasi	1 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan 2 Jumlah Sarana Perdagangan 3 Jumlah Unit Usaha 4 Penyerapan Tenaga Kerja 5 Jumlah Investasi Bidang Perdagangan 6 Papan Informasi Harga Pangan Pasar Strategis	Laporan hasil pendataan Laporan hasil pendataan Laporan hasil pendataan Laporan hasil pendataan Laporan hasil pendataan Laporan pelaksanaan kegiatan
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan koperasi	1 Jumlah Koperasi Aktif 2 Peningkatan SDM Pengelola /Pengurus Koperasi	Rekapitulasi Koperasi Laporan pelaksanaan kegiatan
7	Meningkatnya kualitas produk UMKM dan koperasi	3 Jumlah UMKM Produktif 4 Peningkatan SDM Pelaku UMKM	Laporan hasil pendataan Laporan pelaksanaan kegiatan
8	Meningkatnya kualitas pelayanan dan SDM Disperindagkop Kota Balikpapan (Pelayanan Prima)	1 Jumlah Bimtek Aparatur 2 Jumlah Jaringan Informasi - Buletin Indagkop - Banner di Media Masa - Profil Indagkop	Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan

Balikpapan, 21 Pebruari 2014
Kepala Disperindagkop Kota Balikpapan

Dra. Doortje Marpaung, MM
NIP.19630108 198910 2 001
Pembina Utama Muda



**REVISI PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2013**

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan dan Kemitraan dalam Pengembangan UMKM dan Koperasi	1. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) /KSP (Koperasi Simpan Pinjam) (Unit/KSP)	Unit	12	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro,Kecil Menengah 1. Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM Kota Balikpapan 2. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bagi	145,735,000
		2. Jumlah Unit Simpan Pinjam	Unit	281		87,550,000
		3. Jumlah Gakin yang mengikuti Bimtek	orang	200		
2.	Berkembangnya Kawasan Industri dan Perdagangan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah Kawasan Industri	Kawasan	2	2. Program Penataan Struktur Industri 1. Penyusunan Staudi Kelayakan Gasifikasi di KIKS 2. Amdal Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan (lanjutan 2012)	156,261,000
		Persentase Luasan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan	persen	4,60		521,742,900
		Jumlah Dokumen (Kerangka Acuan ANDAL KIK, Dokumen ANDAL KIK, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan KIK dan Dokumen Rencana Pemantauan KIK)	dokumen	120		
		Jumlah IK yang menerapkan Sistem manajemen Mutu	IK	20	3. Pengembangan Daya Saing Produk Daerah Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu	185,843,800
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil yang siap pakai	persen	100	4. Pengembangan Kerjasama Antar lembaga Dalam Rangka Penciptaan tenaga Kerja Industri	43,234,400
		3. Tingkat Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	IKM	3	5. Pelatihan dan Penerapan Alih Teknologi Tepat Guna di IKM Kota Balikpapan	59,950,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
		Jumlah Operator, IK KIKS dan IKM Kota Balikpapan yang memahami Teknologi Gasifikasi untuk Industri Kecil	orang	20		
		Jumlah Kerjasama yang Terjalin antara IKM Kota Balikpapan dengan IKM dan Instansi Pemerintah Luar Kota	IKM/ Instansi Pemerintah	10	6. Pengembangan Jejaring Bisnis Bagi Industri Kota Balikpapan	99,550,000
		Persentase terbentuknya "Koperasi 10 Kota"	persen	100		
		Jumlah Jaringan Air Bersih yang terbangun di IIB	unit	4	7. Pemeliharaan Fasilitas Umum Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)	118,705,300
		Jumlah IIB yang menerapkan Diversifikasi Teknologi	IIB	9	8. Diversifikasi Teknologi dan Proses Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)	74,900,000
		Jumlah Dokumen Konsep Kelembagaan Mutu Kota Balikpapan	Dokumen	1	9. Pembentukan Kelembagaan Mutu Kota Balikpapan	17,253,200
		Jumlah Operator KIKS, IK KIKS, IK Kota Balikpapan yang memahami Teknis Pemanfaatan Limbah Produksi Tahu Tempe	orang	20	10. Pelatihan dan Pemanfaatan Limbah Produksi Tahu Tempe di KIKS	83,484,400
		Jumlah Dokumen Konsep Kelembagaan UPT-IIB	Dokumen	1	11. Pembentukan Kelembagaan UPT-IIB	20,018,800
		Jumlah IKM yang menerapkan Good Housekeeping di IKM KIKS	IKM	20	12. Pelatihan Penerapan Good Housekeeping di IKM KIKS dan Kota Balikpapan	97,975,000
		Jumlah Rumah Tinggal dan Rumah Produksi Tahu/Tempe	Unit	15	13. Pengembangan Rumah Produksi Industri Tahu/Tempe (Bantuan Keuangan Propinsi)	3,500,000,000
		Jumlah Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil pertanian dan Kelautan	Kawasan	1	14. Pengadaan Lahan Kawasan Industri Kecil dan Menengah 15. Pengadaan Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan kelautan Tahap II	850,000,000 2,000,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
3.	Meningkatnya Investasi dan Produk Sektor Unggulan Daerah	4. Persentase Pertumbuhan Industri	Persen	4.75	3. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	
		Jumlah IKM Aktif yang terdata	IKM	770	1. Evaluasi dan Pemutakhiran data Industri Kota Balikpapan Tahun 2013	51,000,000
		Jumlah Peserta Bimtek	IKM	6	2. Peningkatan Teknologi Produksi Industri Perikanan dan Kelautan	161,773,000
		Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi Industri Perikanan dan	orang	20		
		1. Jumlah Produk Unggulan (Komediti)	Komediti	2	4. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	
		Jumlah IKM yang memiliki Sertifikat Produk	IKM	12	1. Peningkatan Sumber Daya Pelaku Industri Kecil Menengah	369,550,000
		Persentase Produk Bersertifikat	Persen	2	2. Fasilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Paten dan Halal	47,550,000
		2. Jumlah IKM Produktif (Formal & Non Formal)	IKM	4,037	3. Pelatihan HKI bekerjasama dengan klinik HKI	46,350,000
		Jumlah IKM yang memiliki Sertifikat HKI	IKM	20	4. Pelatihan dan Bantuan Kemasan Bagi IKM	50,225,500
		Jumlah IKM yang mendapat bantuan Kemasan	IKM	4	5. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	
		3. Jumlah Peralatan/Mesin	unit	36	1. Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Bantuan Peralatan Produksi	50,000,000
		Jumlah Pameran dan IKM yang mengikuti Pameran	Pameran ; IKM	2 ; 6	6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Usaha Jasa Informal, Mikro, Kecil dan Menengah	
Jumlah IKM Batik yang tumbuh	IKM	5	1. Penyertaan Promosi Produk UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional Kota Balikpapan	432,934,900		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			
4.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kemetrolgian	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Batik dan Bordir	Orang	50	2. Lomba Desain Batik Khas Balikpapan dan Lomba Bordir	120,285,000			
		Jumlah Desain Batik	Desain	100		7. Program Pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga	133,075,000		
		Persentase Peningkatan Penjualan Produk IKM	Persen	25	1. Promosi Produk Olahan Kota Balikpapan				
		1. Persentase Perlindungan terhadap Konsumen 2. Persentase Peralatan Kemetrolgian 3. Persentase Angka Pelanggaran Timbangan 4. Persentase Alat UTP yang ditera ulang Persentase Pengawasan Barang Beredar Persentase Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Persentase Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi Jumlah Reparatur UTP yang Baru dan Bersertifikat	persen persen persen persen persen persen persen Orang	80 60 7.50 100 60 % 60 % 100 % 20	80 60 7.50 100 60 % 60 % 100 % 20			8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1. Penyertaan dan Partisipasi Aktif Dalam Pameran Produk Industri Mikro dan Kecil
						9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Peningkatan Pengawasan Bidang Perdagangan		56,772,070
							2. Pengadaan Sarana Kemetrolgian 3. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	196,400,000	4. Penyusunan Data dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembentukan UPTD Metrologi
						5. Pelaksanaan Kegiatan Kemetrolgian			
							6. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi (DAK dan Pendampingan)	4,535,575,000	
						7. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi (APP)			103,081,250
							8. Pelatihan Refaratir Metrologi	30,000,000	

NO		NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
6.	Meningka UMKM/K	5.	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan dan Ketentuan yang berkaitan dengan investasi	1. Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan	Dollar	2.802.855.198,16	10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	55,306,000
				Jumlah Buku Profil Perdagangan Luar Negeri	Buku	50	1. Pengembangan Informasi Pasar Perdagangan Luar negeri	5,090,200
				Jumlah Pameran yang diikuti	Pameran	2	2. Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	144,184,400
				2. Jumlah Unit Usaha	Unit Usaha	18,239	3. Partisipasi Aktif dan Penyertaan Pameran Produk Unggulan UKM/IKM dan Produk Ekspor Kota Balikpapan	
				3. Jumlah Tenaga Kerja	orang	112,798	11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	183,968,000
				4. Jumlah Investasi Bidang Perdagangan	jt Rp	4,160,661	1. Evaluasi Harga Pasar dan Distribusi Bahan Pokok	71,887,600
				5. Jumlah Sarana Perdagangan			2. Sosialisasi dan Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri	39,045,200
				Pasar Tradisional	Unit Usaha	17	3. Pengawasan Tata Niaga Perdagangan Dalam Negeri	
				Pasar Lokal	Unit Usaha	0		
				Pasar Regional	Unit Usaha	0		
				Pasar Swalayan	Unit Usaha	0		
				Toko Modern :				
				- Hypermart	Unit Usaha	1		
				- Supermarket	Unit Usaha	18		
				- Mini Market	Unit Usaha	94		
				Pasar Grosir	Unit Usaha	1		
				Mall/Plaza	Unit Usaha	7		
				Persetase tertibnya penjualan Minuman Bahan berbahaya	persen	75		
				Jumlah Draft Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	dokumen	1		
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan	orang	15	4. Pelatihan dan Bimbingan Tekhnis Bidang Perdagangan	184,248,400
				6. Papan Informassi Harga Pangan Pasar Strategis	Unit	2	5. Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan	150,883,200
							6. Penyebaran Informasi Harga Pangan Strategis Kota Balikpapan	843,021,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan SDM Disperindagkop Kota Balikpapan (Pelayanan Prima)	<p>1. Jumlah Bimtek Aparatur</p> <p>Persentase Kecukupan Sarana Operasional Perkantoran yang dibutuhkan</p> <p>Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam / Luar Daerah</p> <p>Persentase Kecukupan Sarana Prasarana Operasional Kantor yang diperlukan</p> <p>Persentase Peningkatan Pengetahuan SDM Penyuluh Perindagkop</p> <p>2. Jumlah Publikasi Informasi Indagkop</p> <p>- Media Indagkop</p> <p>- Profil Indagkop</p> <p>- Banner yang ditampilkan</p> <p>5. Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang disusun</p>	<p>bimtek</p> <p>Persen</p> <p>paket</p> <p>persen</p> <p>persen</p> <p>Eksemplar paket kali</p> <p>Dokumen</p>	<p>6</p> <p>100</p> <p>71</p> <p>100</p> <p>75</p> <p>2,000</p> <p>1</p> <p>48</p> <p>21</p>	<p>15. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>1. Penyediaan Perlengkapan, Peralatan Kantor dan Jasa,dll (Indagkop)</p> <p>2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah</p> <p>16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>1. Penyediaan Perlengkapan, Perlatan Kantor dan Jasa Pemeliharaan,dll (Indagkop)</p> <p>Program Penataan Struktur Industri</p> <p>1. Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Disperindagkop</p> <p>17. Program Penyebarluasan Informasi Daerah</p> <p>1. Pembuatan Media Indagkop, Publikasi di Media Cetak dan Profil Indagkop</p> <p>18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>1. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi</p>	<p>650,797,300</p> <p>650,000,000</p> <p>333,799,919</p> <p>75,000,000</p> <p>227,270,000</p> <p>10,000,000</p>
					JUMLAH ANGGARAN DISPERINDAGKOP Tahun 2013	Rp 20,301,014,990

Balikpapan, 21 Februari 2014
Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Balikpapan



Dra. Doortje Marpaung, MM
Dra. Doortje Marpaung, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19630108 198910 2 001

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2013**

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	
						ANGGARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan dan Kemitraan dalam Pengembangan UMKM dan Koperasi	1. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro/KSP (Koperasi Simpan Pinjam) (Unit/KSP)	Unit	12	145,735,000	100,011,000	15
		2. Jumlah Unit Simpan Pinjam	Unit	281			395
		Jumlah Gakin yang mengikuti Bimtek	orang	200	87,550,000	71,728,000	200
2.	Berkembangnya Kawasan Industri dan Perdagangan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah Kawasan Industri	Kawasan	2	156,261,000	144,898,250	2
		2. Persentase Luasan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan	persen	4,60	521,742,900	389,754,900	4,60
		Jumlah Dokumen (Kerangka Acuan ANDAL KIK, Dokumen ANDAL KIK, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan KIK dan Dokumen Rencana Pemantauan KIK)	dokumen	120			120
		Jumlah IK yang menerapkan Sistem manajemen Mutu	IK	20	185,843,800	112,920,000	15
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil yang siap pakai	persen	100	43,234,400	32,795,400	20
		3. Tingkat Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	IKM	3	59,950,000	48,053,000	5
		Jumlah Operator, IK KIKS dan IKM Kota Balikpapan yang memahami Teknologi Gasifikasi untuk Industri Kecil	orang	20			20
		Jumlah Kerjasama yang Terjalin antara IKM Kota Balikpapan dengan IKM dan Instansi Pemerintah Luar Kota	IKM/Instansi Pemerintah	10	99,550,000	76,600,000	10
		Persentase terbentuknya "Koperasi 10 Kota"	persen	100			80
		Jumlah Jaringan Air Bersih yang terbangun di IIB	unit	4	118,705,300	27,310,600	3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI		
						ANGGARAN	TARGET KINERJA	
3.	Meningkatnya Investasi dan Produk Sektor Unggulan Daerah	Jumlah IIB yang menerapkan Diversifikasi Teknologi	IIB	9	74,900,000	49,240,000	4	
		Jumlah Dokumen Konsep Kelembagaan Mutu Kota Balikpapan	dokumen	1	17,253,200	11,346,600	1	
		Jumlah Operator KIKS, IK KIKS, IK Kota Balikpapan yang memahami Teknis Pemanfaatan Limbah Produksi Tahu Tempe	orang	20	83,484,400	42,013,000	20	
		Jumlah Dokumen Konsep Kelembagaan UPT-IIB	dokumen	1	20,018,800	13,320,600	1	
		Jumlah IKM yang menerapkan Good Housekeeping di IKM KIKS	IKM	20	97,975,000	32,423,000	18	
		Jumlah Rumah Tinggal dan Rumah Produksi Tahu/Tempe	Unit	15	3,500,000,000	3,290,379,900	15	
		Jumlah Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil pertanian dan Kelautan	Kawasan	1	850,000,000	768,746,750		
					2,000,000,000	1,620,580,000	1	
		4.	Persentase Jumlah Pertumbuhan Industri	Persen	4.75	51,000,000	29,560,000	4.75
			Jumlah IKM Aktif yang terdata	IKM	770			406
			Jumlah Peserta Bimtek	IKM	6	161,773,000	143,072,250	6
			Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi Industri Perikanan dan Kelautan	orang	20			20
		1.	Jumlah Produk Unggulan (Komediti)	Komediti	2	369,550,000	254,463,901	6
			Jumlah IKM yang memiliki Sertifikat Produk	IKM	12	47,550,000	22,500,000	11
			Persentase Produk Bersertifikat	Persen	2			2
		2.	Jumlah IKM Produktif (Formal & Non Formal)	IKM	4,037			3,795
			Jumlah IKM yang memiliki Sertifikat HKI	IKM	20	46,350,000	28,919,000	16
			Jumlah IKM yang mendapat bantuan Kemasan	IKM	4	50,225,500	31,891,900	0
		3.	Jumlah Peralatan/Mesin	unit	36	80,662,500	45,967,500	33
			Jumlah Pameran dan IKM yang mengikuti Pameran	Pameran ; IKM	2 ; 6	402,272,400	334,581,800	2 ; 6
			Jumlah IKM Batik yang tumbuh	IKM	5			5
			Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Batik dan Bordir	Orang	50			50
			Jumlah Desain Batik	Desain	100	120,285,000	106,610,000	69
	Persentase Peningkatan Penjualan Produk IKM	Persen	25	133,075,000	113,782,000	25		
				224,775,000	201,781,000			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	
						ANGGARAN	TARGET KINERJA
4.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kemetrolgian	1. Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	persen	80	56,772,070	29,914,890	70
		2. Persentase Peralatan Kemetrolgian	persen	60	196,400,000	180,650,000	60
		3. Persentase Angka Pelanggaran Timbangan	persen	7.50	86,034,345	54,060,945	7.50
		4. Persentase Alat UTTP yang ditera ulang	persen	100	205,725,906	121,266,260	100
		Persentase Pengawasan Barang Beredar	persen	60			60
		Persentase Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus	persen	60			60
		Persentase Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi	persen	100 %	4,535,575,000	3,673,135,800	100
					103,081,250	63,273,450	
		Jumlah Reparatur UTTP yang Baru dan Bersertifikat	orang	20	30,000,000	27,879,775	20
		5.	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan dan Ketentuan yang berkaitan dengan investasi	1. Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan	Dollar	2.802.855.198,16	55,306,000
Jumlah Buku Profil Perdagangan Luar Negeri	Buku			50	5,090,200	2,540,200	50
Jumlah Pameran yang diikuti	pameran			2	144,184,400	122,894,400	2
2. Jumlah Unit Usaha	Unit Usaha			18,239	183,968,000	131,651,200	19,017
3. Jumlah Tenaga Kerja	orang			112,798	71,887,600	41,280,000	112,898
4. Jumlah Investasi Bidang Perdagangan	jt Rp			4,160,661			7,116,821
5. Jumlah Sarana Perdagangan							
Pasar Tradisional	Unit Usaha			17			17
Pasar Lokal	Unit Usaha			0			0
Pasar Regional	Unit Usaha			0			0
Pasar Swalayan	Unit Usaha			0			0
Toko Modern :							
- Hypermart	Unit Usaha			1			1
- Supermarket	Unit Usaha			18			18
- Mini Market	Unit Usaha			94			94
Pasar Grosir	Unit Usaha			1			1
Mall/Plaza	Unit Usaha			7			7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
						ANGGARAN	TARGET KINERJA		
6.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan UMKM/Koperasi	Persentase tertibnya penjualan Minuman Bahan berbahaya	persen	75	39,045,200	7,048,500	75		
		Jumlah Draft Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	Dokumen	1			1		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan	orang	13	184,248,400	34,911,300	5		
		6. Papan Informasi Harga Pangan Pasar Strategis				150,883,200	84,283,000		
				Unit	2	843,021,000	788,610,000	2 Unit	
		1. Jumlah Koperasi Aktif		unit	385	46,585,000	38,406,000	410	
						12,500,000	11,463,000		
		2. Peningkatan SDM Pengurus Koperasi	Jumlah Aparatur Pendamping	orang	7	63,900,000	62,868,500		
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi Tingkat Propinsi	orang	190	100,000,000	97,267,200	200	
		7. Meningkatkan Kualitas Produk UMKM/IKM dan Koperasi	1. Peningkatan SDM Pelaku UMKM (Diklat Pelaku UMKM)		persen	100	818,490,000	805,425,500	100
				Jumlah Kelurahan yang mendapat Pelatihan Koperasi	kelurahan	34	27,600,000	19,343,300	
				Jumlah Koperasi Sehat	unit	281	83,250,000	81,382,000	34
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Pembelajaran Usaha Retail Koperasi	unit	9	11,935,000	8,275,000	395
				Persentase Monitoring dan Evaluasi Dana Program Pemerintah	unit	9	59,045,000	52,403,200	9
	persen			100	47,730,000	24,450,000	100		
2. Jumlah UMKM Produktif (UMKM Aktif)		UMKM	300	104,974,000	94,056,000	345			
		UMKM	14,770	337,194,000	163,050,500	19,017			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan SDM Disperindagkop Kota Balikpapan (Pelayanan Prima)	1. Jumlah Bimtek Aparatur	bimtek	6	650,797,300	431,684,930	5
		Persentase Kecukupan Sarana Operasional Perkantoran yang dibutuhkan	paket	71	650,000,000	559,239,400	57
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam / Luar Daerah					
		Persentase Kecukupan Sarana Prasarana Operasional Kantor yang diperlukan	persen	100	333,799,919	234,524,940	98
		Persentase Peningkatan Pengetahuan SDM Penyuluh Perindagkop	persen	75	75,000,000	9,500,000	30
		2. Jumlah Publikasi Informasi Indagkop			227,270,000	203,799,800	
		- Media Indagkop	Eksemplar	2,000			2,000
		- Profil Indagkop	paket	1			1
		- Banner yang ditampilkan	kali	48			48
		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang disusun	Dokumen	21	10,000,000	2,757,300	21
		JUMLAH ANGGARAN DISPERINDAGKOP Tahun 2013			20,301,014,990	16,460,467,641	

Balikpapan, Februari 2014

Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Balikpapan



Dra. Doortje Marpaung, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19630108 198910 2 001

LAPORAN MONITORING KEGIATAN APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013
BULAN Desember 2013

Instansi : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

I. SEKRETARIAT :

NO	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Sebelum Perubahan	JUMLAH ANGGARAN Setelah perubahan	BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp,-)	KET.
						FISIK (%)	TTB	Keuangan			
								Rp	(%)		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	13
A.		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
1	Sila Susiana	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63,635,000	63,635,000	4.89	98.00	4.79	54,865,000	86.22	8,770,000	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207,600,000	207,600,000	15.96	100.00	15.96	99,061,630	47.72	108,538,370	
		3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83,033,500	83,033,500	6.38	98.00	6.26	66,548,500	80.15	16,485,000	
		4 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	66,652,800	66,652,800	5.12	98.00	5.02	40,140,500	60.22	26,512,300	
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,118,000	46,118,000	3.55	99.00	3.51	41,161,200	89.25	4,956,800	
		6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	18,093,000	18,093,000	1.39	99.00	1.38	11,148,550	61.62	6,944,450	
		7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,440,000	20,440,000	1.57	100.00	1.57	16,878,000	82.57	3,562,000	
		8 Penyediaan Makanan dan Minuman	145,225,000	145,225,000	11.16	98.00	10.94	101,881,550	70.15	43,343,450	
		9 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	500,000,000	650,000,000	49.97	98.00	48.97	559,239,400	86.04	90,760,600	Perubahan
		Jumlah A	1,150,797,300	1,300,797,300	100.00	98.67	10.93	990,924,330	73.77	309,872,970	
B.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
2	Mahmudah Noor	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	119,839,191	119,839,191	35.90	98.00	35.18	104,812,850	87.46	15,026,341	
		2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100,490,728	100,490,728	30.11	97.00	29.20	94,300,340	93.84	6,190,388	
		3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5,250,000	5,250,000	1.57	100.00	1.57	5,200,000	99.05	50,000	
		4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15,000,000	15,000,000	4.49	100.00	4.49	856,000	5.71	14,144,000	
		5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8,730,000	8,730,000	2.62	100.00	2.62	2,880,000	32.99	5,850,000	
		6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	84,490,000	84,490,000	25.31	100.00	25.31	26,475,750	31.34	58,014,250	
		Jumlah B	333,799,919	333,799,919	100.00	99.17	16.40	234,524,940	58.40	99,274,979	

NO	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Sebelum Perubahan	JUMLAH ANGGARAN Setelah perubahan	BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp,-)	KET.	
						FISIK (%)	TTB	Keuangan				
								Rp	(%)			
C.	Mahmudah Noor, S.A	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
		1	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	10,000,000	10,000,000	100.0	100.00	100.00	2,757,300	27.57	7,242,700	
		Jumlah C		10,000,000	10,000,000	100.0	100.00	100.00	2,757,300	27.57	7,242,700	
D.	Mahmudah Noor, S.A	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI DAERAH										
		1	Visualisasi Informasi dan Penyusunan Buletin Warta Industri, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan	227,270,000	227,270,000	100.0	100.00	100.00	203,799,800	89.67	23,470,200	
		Jumlah D		227,270,000	227,270,000	100.0	100.00	100.00	203,799,800	89.67	23,470,200	
		Jumlah Sekretariat		1,721,867,219	1,871,867,219	100	99.46	56.83	1,432,006,370	62.35	439,860,849	

II. BIDANG KOPERASI

NO	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Sebelum Perubahan	JUMLAH ANGGARAN Setelah perubahan	BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp.-)	KET.
						FISIK (%)	TTB	Keuangan			
								Rp	(%)		
E.		PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF									
	Hj.Rabiatun	1 Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM	104,974,000	104,974,000	23.74	100.00	23.74	94,056,000	89.60	10,918,000	
	Hj.Rabiatun	2 Pendataan Ulang UMKM, Monitoring, dan Evaluasi UMKM Kota Balikpapan	337,194,000	337,194,000	76.26	95.00	72.45	163,050,500	48.36	174,143,500	
		Jumlah E	442,168,000	442,168,000	100.00	97.50	48.09	257,106,500	68.98	185,061,500	
F		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH									
	Hj.Rabiatun	1 Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM Kota Balikpapan	145,735,000	145,735,000	62.47	90.00	56.22	100,011,000	68.63	45,724,000	
	Hj.Rabiatun	2 Pembinaan dan bimbingan teknis bagi Gakin	87,550,000	87,550,000	37.53	100.00	37.53	71,728,000	81.93	15,822,000	
		Jumlah F	233,285,000	233,285,000	100.00	95.00	46.88	171,739,000	75.28	61,546,000	
G		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI									
	Happy	1 Pertumbuhan / Pendirian Koperasi	46,585,000	46,585,000	4.36	100.00	4.36	38,406,000	82.44	8,179,000	
	Happy	2 Operasional Dekopinda	12,500,000	12,500,000	1.17	100.00	1.17	11,463,000	91.70	1,037,000	
	Happy	3 Diklat dan Bimtek pendamping bagi aparat	63,900,000	63,900,000	5.98	100.00	5.98	62,868,500	98.39	1,031,500	
	Happy	4 Bimtek dan Magang Gerakan Koperasi	100,000,000	100,000,000	9.35	100.00	9.35	97,267,200	97.27	2,732,800	
	Hj.Rabiatun	5 Hari Koperasi Tingkat Provinsi, Nasional dan Pameran Koperasi	500,000,000	818,490,000	76.56	100.00	76.56	805,425,500	98.40	13,064,500	Perubahan
	Hudi	6 Pelatihan Koperasi	27,600,000	27,600,000	2.58	100.00	2.58	19,343,300	70.08	8,256,700	
		Jumlah G	750,585,000	1,069,075,000	100.00	100.00	16.67	1,034,773,500	89.71	34,301,500	
H		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI									
	Hudi	1 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	83,250,000	83,250,000	41.22	100.00	41.22	81,382,000	97.76	1,868,000	
	Hudi	2 Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi	11,935,000	11,935,000	5.91	100.00	5.91	8,275,000	69.33	3,660,000	
	Hudi	3 Pembelajaran Usaha RETAIL Koperasi	59,045,000	59,045,000	29.24	100.00	29.24	52,403,200	88.75	6,641,800	
	Hudi	4 Monitoring dan Evaluasi Dana Program Pemerintah	47,730,000	47,730,000	23.63	100.00	23.63	24,450,000	51.23	23,280,000	
		Jumlah H	201,960,000	201,960,000	100.00	100.00	25.00	166,510,200	51.18	35,449,800	
		Jumlah Bidang Koperasi	1,627,998,000	1,946,488,000	100.00	98.13	29.99	1,630,129,200	71.29	316,358,800	

III. BIDANG PERDAGANGAN

NO	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Sebelum Perubahan	JUMLAH ANGGARAN Setelah perubahan	BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp,-)	KET.
						FISIK (%)	TTB	Keuangan			
								Rp	(%)		
I.		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN									
Jajuli	1	Peningkatan pengawasan barang perdagangan	56,772,070	56,772,070	1.09	100.00	1.09	29,914,890	52.69	26,857,180	
Jajuli	2	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	19,404,349	-	-	-	-	-	-	-	Di Droff
Jajuli	3	Penyusunan Data dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembentukan UPTD Metrologi	86,034,345	86,034,345	1.65	100.00	1.65	54,060,945	62.84	31,973,400	
Jajuli	4	Pelaksanaan Kegiatan Kemetrolgian	205,725,906	205,725,906	3.95	100.00	3.95	121,266,260	58.95	84,459,646	
Jajuli	5	Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi (DAK dan Pendampingan)	4,535,575,000	4,535,575,000	87.00	100.00	87.00	3,673,135,800	80.99	862,439,200	
Jajuli	6	Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Metrologi (APP)	103,081,250	103,081,250	1.98	100.00	1.98	63,273,450	61.38	39,807,800	
Jajuli	7	Pelatihan Refaratir Metrologi	-	30,000,000	0.58	100.00	0.58	27,879,775	92.93	2,120,225	Perubahan
Jajuli	8	Pengadaan Sarana Kemetrolgian	-	196,400,000	3.77	100.00	3.77	180,650,000	91.98	15,750,000	Perubahan
Jumlah I			5,006,592,920	5,213,588,571	100.00	100.00	14.29	4,150,181,120	71.68	1,063,407,451	
J		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR									
Hery Sudianto	1	Pengembangan Informasi Pasar Perdagangan Luar Negeri	55,306,000	55,306,000	27.03	100.00	27.03	51,921,000	93.88	3,385,000	
Hery Sudianto	2	Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	5,090,200	5,090,200	2.49	80.00	1.99	2,540,200	49.90	2,550,000	
Hery Sudianto	3	Partisipasi Aktif dan Penyertaan Pameran Produk Unggulan UKM/IKM dan Produk Ekspor Kota Balikpapan	110,287,600	144,184,400	70.48	100.00	70.48	122,894,400	85.23	21,290,000	Perubahan
Jumlah J			170,683,800	204,580,600	100.00	93.33	33.17	177,355,600	76.34	27,225,000	
K		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI									
Jajuli	1	Monitoring Harga Pasar dan Distribusi Bahan Pokok	183,968,000	183,968,000	12.49	82.00	10.24	131,651,200	71.56	52,316,800	
Jajuli	2	Sosialisasi dan Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri	71,887,600	71,887,600	4.88	75.00	3.66	41,280,000	57.42	30,607,600	
Jajuli	3	Pengawasan Tata Niaga Perdagangan Dalam Negeri	39,045,200	39,045,200	2.65	55.00	1.46	7,048,500	18.05	31,996,700	
Jajuli	4	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan	184,248,400	184,248,400	12.51	75.00	9.38	34,911,300	18.95	149,337,100	
Jajuli	5	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan	150,883,200	150,883,200	10.24	65.00	6.66	84,283,000	55.86	66,600,200	
Jajuli	6	Penyebaran Informasi harga pangan Strategis Kota Balikpapan	-	843,021,000	57.23	100.00	57.23	788,610,000	93.55	54,411,000	Perubahan
Jumlah K			630,032,400	1,473,053,400	100.00	75.33	14.77	1,087,784,000	52.57	385,269,400	
Jumlah Bidang Perdagangan			5,807,309,120	6,891,222,571	100.00	89.56	20.74	5,415,320,720	66.86	1,475,901,851	

IV. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Sebelum Perubahan	JUMLAH ANGGARAN Setelah perubahan	BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp.-)	KET.
						FISIK (%)	TTB	Keuangan			
								Rp	(%)		
L		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI									
	Jane Grace	1 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Bantuan Peralatan produksi	50,000,000	50,000,000	100.00	70.00	70.00	15,305,000	30.61	34,695,000	
		Jumlah L	50,000,000	50,000,000	100.00	70.00	70.00	15,305,000	31	34,695,000	
M		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH									
	Jane Grace	1 Peningkatan Sumber Daya Pelaku Industri Kecil Menengah	369,550,000	369,550,000	50.87	100.00	50.87	254,463,901	68.86	115,086,099	
	Jane Grace	2 Evaluasi dan Pemutakhiran Data Industri Kota Balikpapan	51,000,000	51,000,000	7.02	65.00	4.56	29,560,000	57.96	21,440,000	
	Jane Grace	3 Fasilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Paten, Halal	47,550,000	47,550,000	6.55	80.00	5.24	22,500,000	47.32	25,050,000	
	Jane Grace	4 Pelatihan HKI Kerjasama Dengan Klinik HKI	46,350,000	46,350,000	6.38	100.00	6.38	28,919,000	62.39	17,431,000	
	Edy Adimuntja	5 Peningkatan Teknologi Produksi Industri Perikanan dan Kelautan	161,773,000	161,773,000	22.27	100.00	22.27	143,072,250	88.44	18,700,750	
	Edy Adimuntja	6 Pelatihan dan Bantuan Kemasan Bagi IKM	50,225,500	50,225,500	6.91	90.00	6.22	31,891,900	63.50	18,333,600	
		Jumlah M	726,448,500	726,448,500	100.00	89.17	15.92	510,407,051	64.74	216,041,449	

NO	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Sebelum Perubahan	JUMLAH ANGGARAN Setelah perubahan	BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp,-)	KET.
						FISIK (%)	TTB	Keuangan			
								Rp	(%)		
N.		PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI									
	Edy Adimuntja	1 Penyusunan Studi Kelayakan Gasifikasi di KIKS	156,261,000	156,261,000	1.98	100.00	1.98	144,898,250	92.73	11,362,750	
	Yekti Mei Maharani	2 Pengembangan Daya Saing Produk Daerah Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu	185,843,800	185,843,800	2.35	100.00	2.35	112,920,000	60.76	72,923,800	
	Yekti Mei Maharani	3 Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Penciptaan Tenaga Kerja Industri	43,234,400	43,234,400	0.55	100.00	0.55	32,795,400	75.85	10,439,000	
	Yekti Mei Maharani	4 Pengembangan Sumber Daya Penyuluh Disperindagkop	75,000,000	75,000,000	0.95	80.00	0.76	9,500,000	12.67	65,500,000	
	Yekti Mei Maharani	5 Pelatihan dan Penerapan Alih Teknologi Tepat Guna di IKM Kota Balikpapan	59,950,000	59,950,000	0.76	100.00	0.76	48,053,000	80.16	11,897,000	
	Yekti Mei Maharani	6 Pengembangan Jejaring Bisnis Bagi Industri Kota Balikpapan	99,550,000	99,550,000	1.26	100.00	1.26	76,600,000	76.95	22,950,000	
	Yekti Mei Maharani	7 Pemeliharaan Fasilitas Umum Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)	118,705,300	118,705,300	1.50	100.00	1.50	27,310,600	23.01	91,394,700	
	Yekti Mei Maharani	8 Diversifikasi Teknologi dan Proses Inkubator Industri dan Bisnis (IIB)	74,900,000	74,900,000	0.95	80.00	0.76	49,240,000	65.74	25,660,000	
	Yekti Mei Maharani	9 Pembentukan Kelembagaan Mutu Kota Balikpapan	17,253,200	17,253,200	0.22	100.00	0.22	11,346,600	65.77	5,906,600	
	Yekti Mei Maharani	10 Pelatihan dan Pemanfaatan Limbah Produksi Tahu Tempe di KIKS	83,484,400	83,484,400	1.06	100.00	1.06	42,013,000	50.32	41,471,400	
	Yekti Mei Maharani	11 Pembentukan Kelembagaan UPT - IIB	20,018,800	20,018,800	0.25	100.00	0.25	13,320,600	66.54	6,698,200	
	Yekti Mei Maharani	12 Pelatihan dan Penerapan Good House Keeping di IKM KIKS dan Kota Balikpapan	97,975,000	97,975,000	1.24	100.00	1.24	32,423,000	33.09	65,552,000	
	Yekti Mei Maharani	13 Revisi Amdal Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan (Lanjutan 2012)	521,742,900	521,742,900	6.60	100.00	6.60	389,754,900	74.70	131,988,000	Lanjutan
	Yekti Mei Maharani	14 Pengembangan Rumah produksi Industri Tahu/Tempe (Bantuan Keuangan Propinsi)	3,500,000,000	3,500,000,000	44.28	100.00	44.28	3,290,379,900	94.01	209,620,100	
	Edy Adimuntja	15 Pengadaan Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan (Bantuan Keuangan Propinsi)	850,000,000	850,000,000	10.75	100.00	10.75	768,746,750	90.44	81,253,250	
	Edy Adimuntja	16 Pengadaan Lahan Kawasan Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan Tahap II	-	2,000,000,000	25.30	100.00	25.30	1,620,580,000	81.03	379,420,000	Perubahan
		Jumlah N	5,903,918,800	7,903,918,800	100.00	97.50	6.23	6,669,882,000	65.24	1,234,036,800	
O		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL USAHA JASA INFORMAL MIKRO KECIL DAN MENENGAH									
	Rachman Hadisaputra	1 Penyertaan Promosi produk UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Balikpapan	345,270,000	432,934,900	78.26	100.00	78.26	365,244,300	84.36	67,690,600	
	Rachman Hadisaputra	2 Lomba Desain Motif Batik Khas Balikpapan dan Lomba Bordir	-	120,285,000	21.74	100.00	21.74	106,610,000	88.63	13,675,000	Perubahan
		Jumlah O	345,270,000	553,219,900	100.00	100.00	50.00	471,854,300	86.50	81,365,600	
P		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA									
	Rachman Hadisaputra	1 Promosi Produk Olahan Kota Balikpapan	133,075,000	133,075,000	100.00	100.00	100.00	113,782,000	85.50	19,293,000	
		Jumlah P	133,075,000	133,075,000	100.00	100.00	100.00	113,782,000	85.50	19,293,000	

NO	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Sebelum Perubahan	JUMLAH ANGGARAN Setelah perubahan	BOBOT KEGIATAN	REALISASI				SISA DANA (Rp,-)	KET.	
						FISIK (%)	TTB	Keuangan				
								Rp	(%)			
Q		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH										
	Rachman Hadisaputra	1	Penyertaan dan Partisipasi Aktif Dalam Pameran Industri Mikro Dan Kecil	204,050,000	224,775,000	100.00	100.00	100.00	201,781,000	89.77	22,994,000	Perubahan
			Jumlah Q	204,050,000	224,775,000	100.00	100.00	100.00	201,781,000	89.77	22,994,000	
			Jumlah Bidang Perindustrian	7,362,762,300	9,591,437,200	100.00	92.78	57.03	7,983,011,351	70	1,608,425,849	
			DISPERINDAGKOP T.A 2013	16,519,936,639	20,301,014,990	100.00	94.98	41.15	16,460,467,641	81.08	3,840,547,349	

Balikpapan, 3 Januari 2014
Kepala Disperindagkop Kota Balikpapan


Dra. DOORTJE MARPAUNG MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630108 198910 2 001





	Mall/Plaza	7	7	100
	3. Jumlah Unit Usaha	18.239	19.017	104
	4. Jumlah Tenaga Kerja	112.798	112.898	100
	5. Jumlah Investasi Bidang Perdagangan (Juta Rupiah)	4.160.661	7.116.821	167
	6. Papan Informasi	2	2	100
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan UMKM/IKM dan Koperasi	1. Jumlah Koperasi Aktif	385	410	106
	2. Peningkatan SDM Pengurus Koperasi	190	200	105
Meningkatnya Kualitas Produk UMKM/IKM dan Koperasi	1. Peningkatan SDM Pengurus Koperasi	300	345	115
	2. Jumlah UMKM Produktif	14.770	19.017	128
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan SDM Disperindagkop Kota Balikpapan (Pelayanan Prima)	1. Jumlah Bimtek Aparatur	6	5	83
	2. Jumlah Publikasi Informasi Indagkop :			
	Media Indagkop	2000	2000	100
	Profil Indagkop	1	1	100
	Banner yang ditampilkan	48	48	100

**B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

No	Urusan/Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (%)		Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Disetor ke Kas Negara/Rp)
			Fisik	Keu		
1.	SEKRETARIAT Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.300.797.300	98.67	73.77	990.924.330	309.872.970
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	333.799.919	99.17	58.40	234.524.940	99.274.979
3.	Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	100	27.57	2.757.300	7.242.700
4.	Penyebarluasan Informasi Daerah	227.270.000	100	89.67	203.799.800	23.470.200
5.	BIDANG KOPERASI Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	442.168.000	97.50	68.98	257.106.500	185.061.500
6.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	233.285.000	95	75.28	171.739.000	61.546.000
7.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.069.075.000	100	89.71	1.034.773.500	34.301.500
8.	Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	201.960.000	100	51.18	166.510.200	35.449.800
9.	BIDANG PERDAGANGAN Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	5.213.588.571	100	71.68	4.150.181.120	1.063.407.451
10.	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	204.580.600	93.33	76.34	177.355.600	27.225.000
11.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6.891.222.571	89.56	66.86	5.415.320.720	1.475.901.851
12.	BIDANG PERINDUSTRIAN Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	50.000.000	70	31	15.305.000	34.695.000
13.	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	726.448.500	89.17	64.74	510.407.051	216.041.449
14.	Penataan Struktur Industri	7.903.918.800	97.50	65.24	6.669.882.000	1.234.036.800
15.	Peningkatan Pemasaran Hasil Usaha Jasa Informal Mikro Kecil dan Menengah	553.219.900	100	86.50	471.854.300	81.365.600
16.	Pengembang Industri Kecil Rumah Tangga	133.075.000	100	85.50	113.782.000	19.293.000
17.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	224.775.000	100	89.77	201.781.000	22.994.000

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Balikpapan melalui Sekretariat Daerah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan, perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016 maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan pada Tahun 2013. Berbagai Capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengungkapan Kinerja dan Keuangan berdasarkan tujuan dan sasaran
3. Hasil Capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Berbagai pencapaian

target indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengembangan Industri, Perdagangan dan Koperasi sangat ditentukan oleh komitmen, ketertiban dan dukungan aktif Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha . Dan Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan maupun Dinas / Instansi terkait dan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya memberikan kontribusi yang tidak sedikit.

B. Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi dan mekanisme manajemen internal organisasi dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan

segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Menjadikan SAKIP (Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah) sebagai ukuran kinerja organisasi Pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan ***fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.***

Demikian LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan Tahun 2013 ini disusun sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat dan diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai alat umpan balik yang efektif dalam upaya perbaikan kinerja dimasa akan datang.